

Penelitian Hibah Monodisiplin

LAPORAN PENELITIAN



**Analisis Struktural-Fungsional Model-model Kelembagaan Penyaluran
Bantuan Pembangunan Internasional dari *Emerging Economies*
Anggota G20**

Disusun Oleh:

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D
Ratih Indraswari, SIP. MA

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
Bandung
Nopember 2015**

DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN	3
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. Latar belakang dan permasalahan	5
1.2. Tujuan khusus	9
1.3. Urgensi penelitian	9
1.4. Target Temuan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Kajian Pustaka	11
2.2. Roadmap penelitian	13
BAB III. METODE PENELITIAN	15
BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN	18
4.1. Anggaran Biaya	18
4.2. Agenda Penelitian	19
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Lembaga-lembaga Penyaluran Bantuan Luar Negeri <i>Emerging Economies</i> Anggota G20	20
5.2. Model-model Kerjasama Pembangunan Internasional	47
BAB VI. KESIMPULAN	55
DAFTAR PUSTAKA	56

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Agensi Kerjasama Pembangunan Internasional Negara-negara Maju dalam G20	7
Tabel 1.2. Agensi Kerjasama Pembangunan Internasional Bentuk <i>Emerging Economies</i>	7
Tabel 2.1. Roadmap Penelitian	14
Tabel 3.1. Tahap-tahap Penelitian	16
Tabel 5.1. Struktur dan Fungsi Agensi Kerjasama Pembangunan Internasional <i>Emerging Economies</i>	
Tabel 5.2. Brazilian Cooperation Agency (ABC)	24
Tabel 5.4. Korean International Cooperation Agency (KOICA)	32
Tabel 5.5. Struktur dan Fungsi TIKA	35
Tabel 5.6. South African Development Partnership Agency (SADPA)	39
Tabel 5.7. Development Partnership Administration (DPA)	43
Tabel 5.8. Saudi Fund for Development (Arab Saudi)	46
Tabel 5.9. Model-model Kerjasama Pembangunan Internasional <i>Emerging Economies</i> Anggota G20	47
Tabel 5.10. Prinsip-prinsip Kerjasama-Utara Selatan dan Selatan-Selatan	49
Table 5.11. Karakteristik Kerjasama Selatan-Selatan	50
Tabel 5.12. Prinsip-prinsip KSS	51
Tabel 5.13. Keberagaman Bantuan Pembangunan di antara Sejumlah <i>Emerging Economies</i>	52

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Dimensi Fungsional Lembaga-lembaga Pembangunan Internasional	15
Gambar 5.1. Situs ABC	23
Gambar 5.2. Struktur Penyaluran Bantuan Luar Negeri China	25
Gambar 5.3. Situs Internet Departemen Bantuan Luar Negeri MOFCOM China	28
Gambar 5.4. Negara Penerima Bantuan dari China	28
Gambar 5.5. Tujuan dan Strategi Kerjasama Pembangunan Internasional Korea	31
Gambar 5.6. Jenis-jenis bantuan Korea	31
Gambar 5.7. Situs Internet KOICA	32
Gambar 5.8. Situs Internet Turki	35
Gambar 5.9. Situs Internet SADPA – Afrika Selatan	38
Gambar 5.10. Anggaran Bantuan Luar Negeri India	41
Gambar 5.11. Situs Internet DPA	42
Gambar 5.12. Situs Indian Technical & Economic Cooperation Program	42
Gambar 5.13. Situs Internet SFD – Arab Saudi	45
Gambar 5.14. Negara-negara <i>Emerging Economies</i> dalam Perdebatan Efektivitas Bantuan	53
Gambar 5.15. Perbandingan Pembentukan Institusional Agen-agen Penyalur Bantuan Donor Baru dari Selatan dalam perspektif Spesialisasi dan Fragmentasi	54

RINGKASAN

*Penelitian ini bertujuan melakukan analisis perbandingan struktur dan fungsi tiga model penyaluran bantuan pembangunan yang diadopsi oleh negara-negara 'emerging economies' anggota G20. Ketiga model tersebut adalah Model Development Assistance Committee (DAC), Model Arab dan Model Selatan-Selatan. Sebagai negara yang tergolong sebagai emerging economies, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang, khususnya 'low income countries' (LICs). Kewajiban moral ini menjadi sangat penting terutama setelah Forum G20 menyepakati masuknya agenda pembangunan sebagai komitmen penting bagi anggota-anggota G20. Dibanding dengan 'emerging economies' lain, Indonesia dipandang relative belum siap menjadi 'emerging donor'. Analisis ini akan membantu pemerintah untuk melihat model kelembagaan seperti apakah yang dipandang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk merealisasikan komitmennya dalam G20. Penelitian ini sangat penting untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan pembentukan **Indonesian Aid** (suatu agensi khusus untuk penyaluran bantuan pembangunan ke mitra-mitra Indonesia. Penelitian ini juga sangat penting dalam dunia akademik untuk mengembangkan konsepsi peran emerging economies dalam proses tata kelola ekonomi global. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan memakai pendekatan struktural fungsional. Masing-masing model akan dilihat dan dibandingkan berdasarkan karakteristik struktur, fungsi dan kewenangannya; prinsip-prinsip dan pendekatan yang diadopsi; dan dilakukan assessment atas tingkat efektivitas pemanfaatannya.*

Kata kunci: Kerjasama Pembangunan Internasional, *emerging economies*, negara Berkembang, G20

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang dan Permasalahan Penelitian

Agenda Pembangunan telah menjadi perhatian para pemimpin G20 sejak pelaksanaan KTT G20 di Seoul pada tahun 2010. Beragam isu telah dibicarakan oleh para pemimpin G20 di KTT-KTT selanjutnya. Perhatian terhadap isu pembangunan dipastikan akan menjadi sorotan sentral kembali di KTT G20 di Antalya, Turki pada bulan Nopember 2015 ini. Ini tercermin dalam pernyataan Perdana Menteri Ahmet Davutoğlu, yang bertanggungjawab sebagai tuan rumah KTT G20 di tahun 2015: *“At the international level, challenges facing the LIDCs will be raised more vocally by the G20. This will be one of the defining aspects of the Turkish Presidency.”*¹ Sebagai ketua G20, Turki memiliki keinginan ambisius, yaitu untuk mengintegrasikan negara-negara berpendapatan rendah (LICs) kedalam perekonomian global. Strateginya di antaranya dengan Perhatian besar diarahkan pada beragam aspek termasuk dengan ambisi untuk *“incorporate the developing country perspective to the G20 tax agenda, with an increased emphasis on bilateral and multilateral cooperation between tax authorities.”*² Turki juga berambisi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat global dengan mendukung beragam upaya untuk *“eradicate poverty and ensure sustainable development in LIDCs.”*³

Turki menempatkan agenda Pembangunan sebagai inti dari agenda G20, terutama dengan menyelaraskan agenda G20 dengan agenda global yang dicanangkan oleh PBB di tahun 2015. Ambisinya adalah untuk mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi post 2015 development agenda. Turki menegaskan *“Our primary focus will be on further enhancing the integration of developing and low-income countries into the world economy through concrete and growth-oriented actions.”* Khusus terkait dengan agenda pembangunan ini, Turki menetapkan fokus khusus pada upaya memperbaiki lingkungan investasi, proses persiapan proyek-projek infrastruktur, perluasan inklusi finansial, pengurangan biaya transfer remitens dan bantuan untuk memperoleh keuntungan dari agenda pajak internasional melalui pembangunan kapasitas. Mendukung ketahanan pangan di negara-negara berkembang juga mendapat penekanan dengan fokus pada sistem pangan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Dalam kaitan ini

¹ *“Turkey G20 Presidency Priorities for 2015,”* <https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/2015-TURKEY-G-20-PRESIDENCY-FINAL.pdf>.

² Ibid.

³ Ibid.

Turki ingin menjadi ketua G20 pertama yang mengimplementasikan *the Food Security and Nutrition Framework*. Turki juga bertekad untuk melanjutkan proyek-projek G20 yang bertujuan untuk pembangunan sumberdaya manusia. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan akan menjadi perhatian khususnya terkait pada cara-cara inovatif untuk meningkatkan peran dan kontribusi sektor ini.

Antusiasisme Turki terhadap G20 mencerminkan keinginan untuk mengembalikan peran simbolik negara-negara *emerging economies* sebagai perwakilan negara-negara berkembang dalam G20. Pada tahun 2014, Australia lebih fokus pada agenda ekonomi yang dipandang sebagai *core priority* dalam G20. Kritik justru melihat bahwa kepresidenan Australia terlalu berlebihan pada agenda ekonomi dan cenderung mengabaikan agenda pembangunan.⁴

Tugas utama negara-negara berpendapatan menengah yang tergabung dalam G20 adalah bagaimana mereka membuktikan keseriusan mereka untuk merealisasikan komitmen pada agenda pembangunan. Dengan realisasi ini, efektivitas forum G20 dalam agenda G20 dapat diwujudkan. Dengan demikian, isu pembangunan yang digulirkan oleh negara-negara berkembang dapat benar-benar direalisasikan.

Pembentukan lembaga penyaluran bantuan pembangunan internasional merupakan satu pendekatan yang dapat dipakai untuk memastikan implementasi dari komitmen pembangunan G20, selain komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Negara-negara maju memiliki pengalaman yang sudah cukup mapan dalam mengelola bantuan pembangunan internasional. Ini terkait dengan kewajiban moral mereka untuk mengalokasi 0,7 % dari GDP untuk membantu negara-negara berkembang dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Agensi pembangunan tersebut selama ini telah aktif dalam menyalurkan bantuan di berbagai sektor. Tabel 1.1. menunjukkan agensi pembangunan yang dimiliki negara-negara maju dan Uni Eropa yang khusus menangani penyaluran bantuan pembangunan resmi (Official Development Aid).

⁴ *Tristram Sainsbury "Turkey sets its G20 agenda for 2015"*, <http://www.lowyinterpreter.org/post/2014/11/14/Turkey-sets-its-G20-agenda-for-2015.aspx?COLLCC=3434824554&COLLCC=3526138634&>

Tabel 1.1. Agensi Kerjasama Pembangunan Internasional Negara-negara Maju dalam G20

No	Negara	Agensi Bantuan Pembangunan Internasional
1	Australia	Department of Foreign Affairs and Trade (Development Cooperation Division), formerly AusAID
2	Canada	Canadian International Development Agency (CIDA) and International Development Research Centre (IDRC) CIDA has now been folded into the Department of Foreign Affairs.
3	European Union*	EuropeAid Development and Cooperation
4	France	Department for International Cooperation[8] and French Development Agency (Afd)
5	Germany	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
6	Italy	Ministry of Foreign Affairs: Italian Development Cooperation Programme
7	Japan	Ministry of Foreign Affairs: Official Development Assistance, Japan International Cooperation Agency (JICA), and Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
8	United Kingdom	Department for International Development (DFID)
9	United States of America	United States Agency for International Development (USAID), the Inter-American Foundation (IAF), Millennium Challenge Corporation (MCC), and the African Development Foundation (ADF)

*Satu-satunya Organisasi regional yang menjadi anggota G20

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

Sebagian negara-negara *emerging economies* yang tergabung dalam G20 juga telah membentuk lembaga tersebut, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.2. Kepemilikan agensi pembangunan khusus ini akan membantu penyaluran bantuan *emerging economies* terkait dengan perkembangan pembahasan agenda pembangunan dalam G20.

Tabel 1.2. Agensi Kerjasama Pembangunan Internasional Bentukan *Emerging Economies*

No	Negara	Agensi Bantuan Pembangunan Internasional
1	Brasil	Agência Brasileira de Cooperação
2	China	Department of Foreign Aid of the Ministry of Commerce (MOFCOM)
3	Korea	Korea International Cooperation Agency
4	Arab Saudi	Saudi Fund for Development (Samira)
5	Turki	Turkish International Cooperation and Development Agency (TİKA)
6	India	Development Partnership Administration (DPA)
7	Afrika Selatan	South Africa Development Partnership Agency (SADPA)

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

Indonesia belum memiliki lembaga penyalur bantuan pembangunan khusus, namun telah membentuk South-South Cooperation Coordinating Team (SSCT) sebagai lembaga koordinasi kerjasama pembangunan Internasional. Penyaluran bantuan ke negara-negara berkembang dilakukan oleh kementerian-kementerian secara terpisah-pisah seperti kementerian pertanian, kementerian luar negeri, kementerian pendidikan. Menurut Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, lembaga khusus yang nantinya berfungsi secara otoritatif dalam penyaluran bantuan luar negeri Indonesia baru akan dibentuk pada tahun 2025.

Yang saat ini terjadi adalah pro kontra menyangkut perlu tidaknya segera pembentukan lembaga khusus penyalur bantuan pembangunan ke negara-negara berkembang. Tiga kementerian yang selama ini bersinggungan dengan bantuan luar negeri (Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan) mendukung pembentukan lembaga tersebut, sementara satu kementerian (Bappenas) masih melihat perlunya memaksimalkan peran lembaga koordinasi yang ada.⁵

Fakta ini cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam. Indonesia telah menjadi negara yang telah aktif dalam menyediakan bantuan pembangunan sejak tahun 1960. Sekalipun jumlahnya relatif kecil, bantuan ini menunjukkan suatu kekuatan moral bagi pentingnya kerjasama di antara negara-negara berkembang. Sejak tahun 2000, jumlah bantuan Indonesia meningkat secara signifikan. Diperkirakan hingga tahun 2013, jumlahnya mencapai 49 milyar rupiah.⁶ Namun penyaluran bantuan tersebut selama ini dilakukan oleh masing-masing kementerian.

Sejak tahun 2011, inisiatif untuk mengkoordinasikan bantuan telah dilakukan dengan pembentukan tim koordinasi nasional kerjasama selatan-selatan dan triangular. Blueprint kerjasama selatan-selatan juga telah dibuat. Dalam rencana tersebut, Indonesia berkeinginan untuk membentuk lembaga penyalur bantuan Indonesia pada tahun 2025.

Mengingat pertimbangan tersebut, sangatlah perlu dibuat suatu kajian tentang model kelembagaan khusus yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan luar negeri terutama untuk memastikan efektivitas penyalurannya.

⁵ Wawancara dengan perwakilan dari Sekretariat Negara, Kementerian luar negeri dan kementerian keuangan pada bulan Juni 2014.

⁶ Yulius P Hermawan dan Syurkani Ishak Kasim (2013). "Penyediaan Official Development Assistance", dalam Irfa Ampri, et.al. (eds). *Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20*. Jakarta: Pusat Kebijakan dan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF, Kemenkeu RI, hal. 203-224.

I.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model-model kelembagaan penyaluran bantuan pembangunan oleh *emerging economies* kepada negara-negara berkembang khususnya *Less Income Countries* (LICs).

Secara lebih khusus, penelitian ini akan melihat **struktur kelembagaan, kewenangan, dan pendekatan bantuan pembangunan internasional yang diadopsi oleh masing-masing *emerging economies***. Penelitian ini akan menganalisis (1) struktur kelembagaan agensi tersebut (misalnya apakah berada dibawah kementerian luar negeri, atau kementerian lain; hubungan antar kementerian; pertanggungjawaban pendanaan; lembaga pelaksana; proses monitoring dan evaluasi, dll); (2) kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut; (3) pendekatan yang diadopsi oleh lembaga tersebut; (4) evaluasi tingkat efektivitas praktik penyaluran bantuan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut di berbagai negara *emerging economies*.

Lembaga-lembaga yang akan dikaji meliputi agensi-agensi pembangunan yang telah dikembangkan oleh tujuh *emerging economies* anggota G20, yaitu Brasil, China, Korea, Arab Saudi, Turki, India dan Afrika Selatan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini dipandang *urgent* untuk dilakukan atas dasar dua argumen, teoretikal-konseptual dan empirikal.

Argumen pertama bersifat konseptual, yaitu belum adanya kajian akademis yang secara khusus dibuat untuk melihat pendekatan yang tepat untuk diadopsi oleh suatu ‘emerging economy’ seperti Indonesia dalam menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Kajian yang sudah cukup berkembang lebih melihat pendekatan tradisional yang diadopsi negara-negara maju sebagai negara donor pembangunan sejak tahun 1970an. Bank Dunia dan OECD telah menghasilkan beragam evaluasi terhadap penerapan pendekatan tradisional ini yang umumnya menekankan pada bantuan donor melalui lembaga-lembaga multilateral (seperti Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, IMF) maupun melalui kerjasama bilateral.

Dalam kaitan ini, kebijakan negara-negara berstatus ‘emerging economy’ cenderung bersifat inkremental dan reaktif terhadap usulan-usulan yang dibuat dalam forum multilateral atau dalam perjanjian bilateral. Adalah sangat penting untuk

mengembangkan suatu pendekatan khusus yang bisa diadopsi negara-negara donor baru seperti Indonesia untuk menjamin efektivitas penyediaan dan penyaluran ODA.

Argumen kedua bersifat empirikal yang terkait dengan praktik penyaluran bantuan pembangunan Indonesia saat ini yang masih sangat tidak terkoordinasi. Kajian ini dipandang mendesak terutama untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah menyangkut model kelembagaan penyalur bantuan pembangunan internasional Indonesia.

Karena alasan inilah penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan. Keutamaan penelitian ini adalah mengembangkan suatu model ideal yang *workable* bagi Indonesia sebagai salah satu *emerging economies* untuk memenuhi komitmen agenda pembangunan yang telah dibuat dalam forum G20. Model kelembagaan konvensional yang dimiliki negara-negara maju tidak sepenuhnya cocok untuk Indonesia.

1.4. Target Temuan dan Luaran Penelitian

Target temuan yang ditemukan adalah model yang *workable* untuk diadopsi oleh Indonesia dan *emerging economies* lain dalam penyaluran bantuan pembangunan internasional ke negara-negara berkembang, khususnya LICs.

Luaran kongkrit yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Artikel Jurnal

Penelitian ini dapat menghasilkan artikel jurnal yang dipublikasikan dalam jurnal nasional.

2. Dalam bidang IPTEKS

Pengembangan teori/model kelembagaan penyediaan bantuan pembangunan oleh *emerging economy* sebagai *new emerging aid donor*. Pengembangan teoretis ini akan dirumuskan dalam bentuk publikasi artikel jurnal.

3. Policy Paper (rekomendasi kebijakan)

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi blue print kebijakan ODA yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia (khususnya Bappenas dan Kantor Koordinasi Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular) dalam merumuskan lembaga yang tepat untuk penyediaan dan penyaluran bantuan pembangunan luar negeri dan bagi pelaku diplomasi ekonomi Indonesia dalam merumuskan posisi dan komitmennya dalam negosiasi-negosiasi multilateral dan bilateral.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Minat para akademisi dan peneliti terhadap kerjasama pembangunan internasional telah berkembang sejak tahun 1970an ketika negara-negara maju 'berkomitmen' untuk menjadi donor bagi negara-negara berkembang. Dalam konteks di mana donor dari negara-negara maju mendominasi pola hubungan Utara-Selatan, kajian telah sangat kaya dengan analisis tentang ragam bantuan dan tingkat efektivitas dari bantuan tersebut.⁷ Mosley (1985) melakukan kuantifikasi kualitas bantuan dengan melihat kriteria termasuk selektivitas negara-negara penerima bantuan, tingkat konsensualitas, dan kondisionalitas.⁸ McGillivray (1989) dan McGillivray dan White (1994) mengkaji beragam cara pemanfaatan pendapatan perkapita penerima bantuan sebagai ukuran penseleksian donor.⁹ Crawford dan Hermawan (2001) melihat peran donor dalam penetapan agenda, program dan aktivitas dalam penyaluran dana bantuan multidonor untuk reformasi demokrasi dan tata pemerintahan.¹⁰ Pada tahun 2002, Collier dan Dollar (2002) mengembangkan metodologi memaksimalkan efek bantuan terhadap pengurangan angka kemiskinan dengan mendasarkan pada ukuran-ukuran penseleksian penerima bantuan.¹¹ Kajian lain melihat tata kelola/governance seperti yang dilakukan oleh Kaufmann, Kraay dan Zoido (1999)¹², dan birokrasi seperti yang dilakukan oleh Knack dan Rahman (2004).¹³

Masih terkait dengan peran besar negara-negara maju, kajian tentang bantuan pembangunan resmi ini juga telah memberikan perhatian terhadap model dan instrumen ideal untuk mengukur efektivitas penyaluran bantuan pembangunan. Pada tahun 2008 Easterly dan Pfutze (2008) menyusun empat dimensi ideal dari lembaga bantuan

⁷ Pemetaan perkembangan kajian atas ODA sebagian mengacu pada Nancy Birdsall dan Homi Kharas (2010). *Quality of Official Development Assistance Assesment*. Washington: Center for Global Development.

⁸ Mosley, P. (1985). "The Political Economy of Foreign Aid: A Model of the market for a Public Good," *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 33, No. 2, hal. 373-93.

⁹ Mc. Gillivray, M. (1989). "The Allocation of Aid Among Developing Countries: A Multi-Donor Analysis Using a Per Capita Aid Index," *World Development*, Vol 17, no. 4, hal. 561-8 dan McGillivray, M., dan H White (1994). *Development Criteria for the Allocation of Aid and Assesment of Donor Performance*." Center for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham, UK.

¹⁰ Crawford, G dan Hermawan, YP. "Whose Agenda? "Partnership" and Internasional Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 24 No.2. hal. 203-229.

¹¹ Collier, P. dan D. Dollar (2001). "Can the World Cut Poverty in Half? How Policy Reform and Effective Aid Can Meet the International Development Goals." *World Development* Vol. 29, No. 11, hal. 1787-02.

¹² Kaufmann D. et.al. (1999). "Governance Matters", Policy Research Working Paper 2196. Washington DC: Bank Dunia.

¹³ Knack, S. dan A Rahman (2004). "Donor Fragmentation and Bureaucratic Quality In Aid Recipients", Policy Research Working Paper 3186. Washington DC: Bank Dunia.

internasional.¹⁴ Roodman (2009) memperhitungkan volume bantuan dengan dasar ukuran kualitas tertentu; pengkaji ini berupaya untuk mengevaluasi praktek pemberian bantuan untuk kemudian menyusun suatu matrik yang berdasar pada kualitas.¹⁵ Knack, Rogers dan Eubank (2010) mengembangkan 18 indikator praktik yang dilakukan oleh donor.¹⁶ Pada tahun 2010, Nancy Birdsall dan Homi Kharas menetapkan empat dimensi ‘aid diamond’ dan 30 indikator untuk menilai kualitas ODA. Pada tahun 2012, Jan Vanheukelom dan tim melakukan kajian tentang bagaimana ODA dapat menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan.¹⁷

Dalam kurun sepuluh tahun belakangan ini, terdapat pengayaan penting yang berkembang dalam kajian tentang kerjasama pembangunan internasional. Perhatian diberikan pada peran *emerging economies* sebagai *provider* bantuan pembangunan internasional. Kecenderungan baru ini mencerminkan perkembangan baru dari trend yang terjadi dalam kerjasama pembangunan internasional. Selama ini memang didominasi oleh donor-donor tradisional yang tergabung dalam DAC-OECD. Perkembangan satu dekade belakangan menggambarkan peningkatan peran negara-negara berkembang yang perekonomiannya bertumbuh dengan relatif sangat baik dalam membantu negara-negara berkembang lain untuk mensukseskan pembangunan mereka. Perhatian lebih khusus diberikan pada negara-negara berpendapatan menengah yang bergabung dalam G20.¹⁸ Perhatian ini muncul terutama sejak tahun 2010 ketika G20 menetapkan agenda pembangunan sebagai salah satu agenda penting dalam proses G20. Anggota-anggota G20 berkomitmen untuk memberikan perhatian pada isu pembangunan di negara-negara berkembang khususnya negara-negara berpendapat rendah.

Dengan peningkatan peran *emerging economies* sebagai *provider* bantuan pembangunan internasional, ragam kajian dibuat untuk melihat pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh *emerging aid provider* atau *emerging donor*. Sejumlah penstudi menyusun klasifikasi dari penyedia bantuan pembangunan yang terhitung baru (dengan pengertian di luar kategori donor yang tergabung dalam OECD). Kategorisasi itu disusun

¹⁴ Easterly, W dan T Pfitze. (2008). “Where does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid.” Working paper 21. Washington, DC: Brooking Global Economy and Development.

¹⁵ Roodman, D. (2009). “An Index of Donor Performance”, Working Paper 67. Washington, DC: Center for Global Development.

¹⁶ Knack, S et.al. (2010). “Aid Quality and Donor Rankings.” Policy Research Working Paper 5290, Washington DC: Bank Dunia.

¹⁷ Jan Vahnheukelom, et.al. (2012). “Reporting on Development: ODA and Financing for Development”, Final Report, European Centre for Development Policy Management. April 2012.

¹⁸ Termasuk dalam kategori ini adalah China, Korea, Brazil, India, Indonesia, Arab Saudi, Turki, Afrika Selatan dan Meksiko.

berdasarkan modalitas dan karakteristik dari program-program bantuan dan juga peran mereka dalam ekonomi politik global. Richard Manning (2006) menyusun empat model: (1) anggota OECD yang bukan menjadi bagian dari DAC; (2) anggota Uni Eropa yang tidak menjadi anggota OECD; (3) negara-negara Timur Tengah dan OPEC dan “negara-negara lain yang tidak masuk dalam ketiga kategori tersebut. Zimmerman dan Smith (2011) menetapkan tiga kelompok yaitu: (1) Emerging donors, (2) South South cooperation dan (3) donor Arab.¹⁹

Penelitian ini melihat pada tiga model kerjasama pembangunan internasional yang diadopsi oleh *emerging economies*, Model tersebut adalah (1) Model DAC, (2) Model Arab, dan (3) Model Kerjasama Selatan-Selatan (Southern Model). Sejumlah *emerging economies* telah membentuk agensi khusus yang menangani penyaluran bantuan pembangunan internasional mereka. Agensi ini dipandang penting untuk mengkoordinasikan pemanfaatan bantuan mereka ke negara-negara berkembang lain.

Penelitian ini secara khusus akan melihat aspek kelembagaan dan pendekatan negara-negara *emerging economies*, yang tergabung dalam G20, dalam menyalurkan bantuan pembangunan internasional. Struktur yang dibangun diasumsikan sejalan dengan prinsip-prinsip kerjasama pembangunan internasional yang diadopsi oleh negara tersebut. Misalnya, jika tujuan pembangunan internasional menjadi instrument untuk promosi perdagangan dan investasi, strukturnya akan diintegrasikan ke dalam fungsi kementerian perdagangan. Jika tujuannya lebih dekat ke politik domestik, strukturnya akan diintegrasikan ke dalam kementerian luar negeri atau kementerian dalam negeri.

2.2. Roadmap Penelitian

Terkait dengan ini penelitian yang sudah dilakukan peneliti selama ini melihat bagaimana peran Indonesia dalam proses G-20 (2009-2011), dan bagaimana Indonesia memenuhi komitmen-komitmennya dalam G-20 (2012-2013). Tabel 2.3. menunjukkan roadmap penelitian yang telah, sedang dilaksanakan dan rencana penelitian ke depan. Pada tahun 2014, peneliti telah melihat pengembangan model kerjasama Selatan-Selatan dengan perspektif yang general. Peneliti juga telah melihat bantuan Indonesia dalam bidang ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia.

¹⁹ Pemetaan ini dapat dilihat dalam Julie Walz dan Vijaya Ramachandran, (2011) “Brave New World. A Literature Review of Emerging Donors and the Changing Nature of Foreign Assistance.” Working paper 273 November 2011, Center for Global Development.

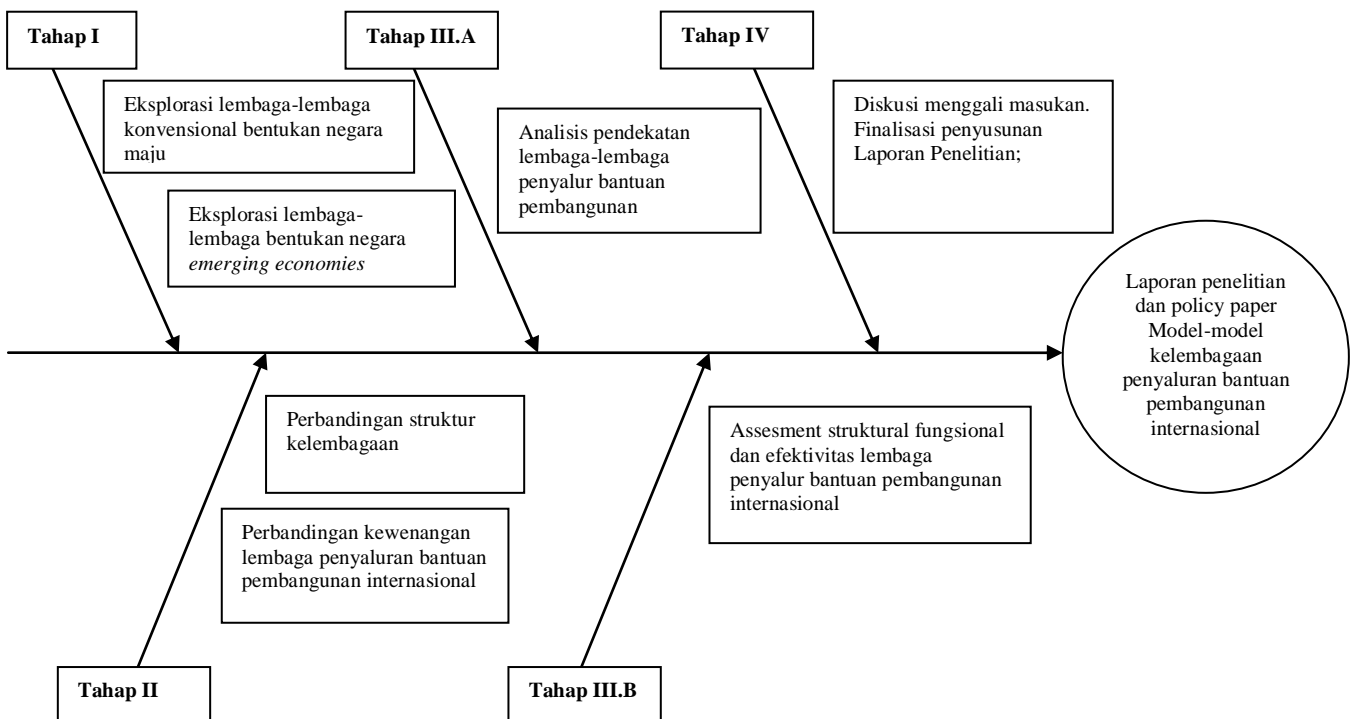
Tabel 2.3. Roadmap Penelitian

Tahun	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016-2017	2018 - 2019	2020-2021
Peneliti an	Peran Indonesia dalam G-20	Analisis Kepatuhan Indonesia terhadap komitmen finansial dan pembangunan dalam G-20	Analisis Pemenuhan 7 Komitmen prioritas Indonesia dalam G-20	Analisis penyediaan ODA oleh Indonesia	Analisis Struktural fungsional – komparatif Model-model Kelembagaan Penyaluran Bantuan Pembangunan Internasional	Pengembangan <i>Southern Model</i> dalam Kerjasama Pembangunan Internasional di bidang Ketahanan Pangan, Sumber Daya manusia dan Pendanaan Infrastruktur	Peran <i>New Emerging Economy</i> dalam Tata Kelola Global	Pembentukan tata kelola global yang <i>Sustainable</i> , adil dan berkeeseimbangan
Luaran	Publikasi Buku (Inggris dan Indonesia): <i>The Role of Indonesia in the g-20: Background, Role and Objectives of Indonesia's Membership</i> , (Jakarta: FES, 2011 dan 2012).	Publikasi jurnal nasional: “Legitimasi, Efektivitas dan Akuntabilitas G20 Sebagai Klub Eksklusif dalam pembentukan Tata kelola Ekonomi Global” (Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. 8, no. 2, September 2012).	Publikasi buku: “Akuntabilitas komitmen Indonesia pada G20” (Jakarta: Kemenkeu RI, Oktober 2013)	Publikasi: “Indonesia in international Institutions: Living Up Ideals”, (Issue Brier, ANU Defense College, 2014)	Publikasi: “Indonesia and International Institutions: Treading New Territory” (Palgrave Macmillan, February 2015) “Moving Beyond A Vocal Moral Initiator: Indonesia and its Role as a New Emerging Donor in the South South and Triangular Cooperation” (Jurnal internasional, proses)	Rencana – Publikasi Jurnal Internasional: “ <i>Southern Model</i> in Promoting Food Security and Human Resource Development”	Rencana – Publikasi Jurnal Internasional: “Problems in Promoting the International Development Cooperation in Infrastructure Financing”	Rencana – Publikasi buku – internasional: “Indonesia and New Global Order”

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang aspek kelembagaan agensi penyaluran bantuan pembangunan internasional yang dibentuk oleh anggota-anggota G20, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi *emerging economies* menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Pada tahap awal akan dilakukan eksplorasi (penggalan data) melalui penelusuran dokumen dan data-data terkait dengan aspek kelembagaan agensi penyaluran bantuan pembangunan internasional yang dibentuk *emerging economies* yang menjadi anggota G20. Data-data ini dieksplorasi dari sumber-sumber/laporan resmi yang disusun oleh lembaga-lembaga penyaluran bantuan pembangunan internasional di masing-masing negara. Penelitian ini juga akan melihat laporan yang disediakan oleh OECD, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Regional.

Gambar 3.1. Fish bone diagram tahapan-tahapan penelitian Model Kelembagaan Penyaluran Bantuan Pembangunan Internasional dari *Emerging Economies*



Selanjutnya akan dilakukan pengidentifikasian agensi pembangunan internasional yang dibentuk oleh anggota-anggota G20, khususnya tujuh *emerging economies*. Yang

dilanjutkan dengan kajian perbandingan struktur kelembagaan dan kewenangan lembaga penyaluran bantuan pembangunan internasional. Analisis selanjutnya lebih melihat pada pendekatan-pendekatan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional tersebut. Dengan melihat pada struktur, kewenangan dan pendekatan tersebut, kemudian akan dilihat tingkat potensi dan aktualisasi efektivitas penyaluran bantuan pembangunan internasional. Tahap-tahap selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. Tahapan-tahapan tersebut secara rinci dapat dilihat lebih lanjut dalam Tabel 3.1. Dalam Tabel 5 tersebut dipaparkan masing-masing tahapan berdasarkan kegiatan penelitian, tujuan, lokasi penelitian, luaran, indikator capaian, lokasi dan alokasi waktu.

Penelitian ini akan menggali data-data dari sumber-sumber yang tersedia mengenai model-model kelembagaan penyaluran bantuan pembangunan internasional, termasuk menyelusuri publikasi internet dan dokumen resmi dari pemerintah negara-negara *emerging economies* dan wawancara dengan perwakilan-perwakilan mereka di Jakarta dan responden lain yang relevan. Data ini akan didukung oleh sumber-sumber sekunder yang telah dipublikasikan secara luas seperti buku, artikel jurnal dan berita-berita terkait dari media massa.

Tabel 3.1. Tahap-tahap Penelitian

Tahap	Rincian Kegiatan
Tahap I	Tujuan <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lembaga-lembaga konvensional bentukan negara maju - Identifikasi lembaga-lembaga bentukan negara <i>emerging economies</i>
	Lokasi <ul style="list-style-type: none"> - Bandung
	Luaran: <ul style="list-style-type: none"> - Data kelembagaan dari berbagai model penyaluran bantuan pembangunan internasional
	Indikator Capaian: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan deskriptif lembaga-lembaga penyalur bantuan pembangunan
	Alokasi waktu: 3 bulan
Tahap II.	Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> - Membandingkan struktur kelembagaan - Membandingkan kewenangan lembaga penyaluran bantuan pembangunan internasional
	Lokasi: <ul style="list-style-type: none"> - Bandung, Indonesia

	<p>Luaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matrik perbandingan lembaga-lembaga berdasarkan model-model yang ada
	<p>Indikator Capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil perbandingan
	<p>Alokasi Waktu: 2 bulan</p>
Tahap III.	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis Pendekatan lembaga-lembaga penyalur bantuan pembangunan internasional di masing-masing model - Assesment structural fungsional dan efektivitas lembaga penyaluran bantuan pembangunan internasional
	<p>Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bandung, Indonesia - Jakarta: (perwakilan negara-negara <i>emerging economies</i>)
	<p>Luaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis pendekatan-pendekatan kerjasama pembangunan internasional
	<p>Indikator Capaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deskripsi pendekatan-pendekatan di masing-masing model
	<p>Alokasi waktu 2 bulan</p>
Tahap IV	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan draft laporan penelitian - Diskusi menggali masukan - Finalisasi laporan
	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bandung, Indonesia
	<p>Luaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Penelitian
	<p>Indikator Capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Penelitian - Draft artikel jurnal
	<p>Alokasi waktu: 2-3 bulan</p>

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN

4.1. Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)	
1.	Gaji dan upah (peneliti)	4.500.000	
2.	Bahan habis pakai dan peralatan:	- Alat-alat tulis (Tinta printer, Kertas, bolpoint)	500.000
		- Pengadaan buku dan dokumen	1.000.000
		- Konsumsi untuk wawancara dengan narasumber dan diskusi/analisis data	1.000.000
		- Honor Surveyor/asisten Peneliti 500.000 x 4	2.000.000
		- Cinderamata narasumber	500.000
	Sub total		(5.000.000)
3.	Perjalanan:	Dalam kota	1.000.000
		Bandung-Jakarta (perwakilan tujuh <i>emerging economies</i> di Jakarta)	2.000.000
	Sub total		(3.000.000)
4.	Fotokopi laporan untuk materi diskusi	1.000.000	
	Penggandaan dan penjilidan laporan akhir (untuk LPPM) dan versi cetak untuk Bappenas dan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Kementan, Kemenkeu, Kemenlu, Kantor KSST)	1.500.000	
	Sub total		(2.500.000)
Jumlah		15.000.000	

4.2. Agenda penelitian tahun ke-1 ini disusun sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Bulan ke -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan outline detail operasional												
2	TAHAP I: 1. Eksplorasi lembaga-lembaga konvensional bentukan negara maju 2. Eksplorasi lembaga-lembaga bentukan emerging economies												
3	TAHAP II: 1. Perbandingan struktur dan kewenangan kelembagaan												
4	Tahap III: 1. Analisis pendekatan kerjasama pembangunan internasional 2. Assesment structural fungsional dan efektivitas lembaga penyalur bantuan pembangunan internasional												
5	Tahap IV: Penyusunan dan Finalisasi Laporan Penelitian												
6	Penyerahan laporan final												

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab V ini akan memaparkan hasil temuan dari penelitian ini dengan melihat fungsi yang diemban oleh agensi-agensi kerjasama pembangunan internasional dan struktur agensi-agensi kerjasama pembangunan tersebut untuk menjalankan fungsi tersebut. Fungsi yang akan dianalisis mencakup tujuan pembentukan agensi, mandat yang diberikan, program dan proyek yang dikembangkan dalam penyaluran bantuan internasional, serta negara-negara penerimanya. Pembahasan fungsi juga akan melihat model-model yang diadopsi *emerging economies* dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini menggali data melalui situs-situs internet yang disediakan oleh masing-masing agensi, serta mengumpulkan data tambahan dari penelitian sebelumnya, dan juga penelitian-penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh para peneliti lain. Kemudian akan dibahas bagaimana model Kerjasama Selatan-selatan dapat menjadi model alternatif dalam kerjasama pembangunan internasional.

5.1. Lembaga-lembaga Penyaluran Bantuan Luar Negeri oleh *Emerging Economies*

Sejak tahun 2000an telah terjadi peningkatan peran negara-negara *emerging economies* dalam menyediakan bantuan pembangunan bagi negara-negara berkembang lainnya (Walz dan Ramachandran, 2011). Pada tahun 2009, diperkirakan bantuan India telah mencapai 488 hingga 2,171 juta dolar sebagai bantuan luar negeri, sementara Brazil menyediakan 356 juta dolar hingga 4.000 juta dolar dan China 1.500 juta dolar hingga 25.098 juta dolar. Negara-negara penyedia bantuan lain mencakup Afrika Selatan yang mengalokasikan 109 hingga 575 juta dolar, dan Turki yang mengalokasikan 707 juta dolar.

Negara-negara penyedia bantuan luar negeri baru tersebut (*emerging donor*) telah membentuk lembaga khusus untuk menyalurkan bantuan luar negeri mereka, seperti telah dipaparkan dalam Bab I (Lihat kembali Tabel 1.2 halaman 6). Brazil membentuk Agência Brasileira de Cooperação, China membangun Department of Foreign Aid of the Ministry of Commerce (MOFCOM), India mendirikan Development Partnership Administration (DPA), Turkey memiliki Turkish International Cooperation and Development Agency (TIKA), dan Afrika Selatan mempunyai South Africa Development Partnership Agency (SADPA) sebagai lembaga penyaluran bantuan luar negeri mereka. Tabel 5.1. memaparkan struktur dan fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga khusus yang dibentuk oleh negara-negara *emerging economies* anggota G20.

Tabel 5.1. Struktur dan Fungsi Agensi Kerjasama Pembangunan Internasional Emerging Economies

No	Nama Agensi	Struktur	Fungsi
1	Brazilian Cooperation Agency (ABC)	Berafiliasi dengan Kementerian Hubungan Eksternal	Melaksanakan semua kerjasama teknikal internasional
2.	DFA-MOFCOM - China	DFA di dalam MOFCOM; Bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Eximbank of China	Penanggungjawab utama bantuan luar negeri China dengan tugas memformulasi dan mengimplementasi rencana dan kebijakan bantuan luar negeri China
3.	KOICA - Korea	Independen	Mengelola bantuan hibah dan program-program kerjasama teknikal; Kemenlu dan Kementerian Strategi dan Keuangan kelola bantuan multilateral
4.	TIKA	Di bawah (di dalam kantor) Perdana Menteri	Mengelola bantuan luar negeri Turki ke negara-negara berkembang lain
5.	SADPA	Di dalam Kementerian Hubungan dan Kerjasama Internasional	Ditetapkan delapan fungsi SADPA, di antaranya adalah mengembangkan garis-garis besar kerjasama pembangunan Afrika Selatan dan memastikan koherensinya
6.	DPA – India	Di dalam Kementerian Urusan Eksternal; Ada tiga divisi dalam DPA, yaitu DPA I, DPA II dan DPA III dengan kewenangan masing-masing	Menangani proyek-proyek bantuan India melalui penyiapan konsep, peluncuran, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek bantuan luar negeri.
7	The Saudi Fund for Development	<i>Legal entity</i> yang independen, diketuai oleh Menteri Keuangan yang memimpin Dewan Direktur. Tugas sehari-hari ditangani oleh Wakil Ketua/Managing Director	Mengimplementasikan keputusan-keputusan Dewan Direktur mengenai bantuan luar negeri Arab Saudi.

Sumber: Diolah dari informasi yang tersedia di situs internet resmi masing-masing agensi.

Selanjutnya akan dipaparkan struktur dan fungsi masing-masing agensi tersebut, serta prinsip-prinsip dan model yang diadopsi oleh agensi tersebut.

1. Brazilian Cooperation Agency (ABC)

ABC berafiliasi dengan Kementerian Hubungan Eksternal (Ministry of External Relations). Merupakan agensi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kerjasama teknik internasional.²⁰

²⁰ Deskripsi tentang ABC sebagian besar diambil dari situs ABC, ditambah dengan sumber-sumber seperti diindikasikan secara langsung dalam bagian ini. Lihat: http://www.abc.gov.br/training/informacoes/ABC_en.aspx.

Mandat yang diberikan kepada agensi ini adalah melakukan negosiasi, koordinasi, implementasi dan monitor proyek-proyek dan program-program kerjasama teknik yang dikembangkan dari perjanjian yang telah ditandatangani antara Brazil dan negara-negara lain serta organ-organ internasional. ABC juga bertanggungjawab untuk memberikan panduan pada agen-agen Brasil lain terkait dengan peluang kerjasama yang melibatkan Brasil. Dalam hal ini ABC mendukung persiapan proyek, mengkoordinasikan negosiasi antara pihak-pihak yang bekerjasama dan penerima (beneficiary). ABC juga melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi proyek-proyek, serta memberikan informasi terkait dengan perkembangan proyek tersebut dan pencapaian hasilnya.

Pemerintah Brasil mengharapkan bahwa ABC dapat memainkan peran politik yang penting dalam diplomasi sebagai agen kerjasama teknik dengan negara-negara berkembang lain. Tujuannya adalah mendiseminasikan citra modern Brazil dan institusi-institusinya. ABC juga diharapkan memainkan peran dalam mengkonsolidasikan peran kepemimpinan Brasil baik di tingkat regional maupun internasional.

Partner-partner utama ABC adalah negara-negara berbahasa Portugis (PALOPS), Timor Leste, Negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Tujuan utama dari kerjasama teknik ini adalah melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan, Brasil dapat memperkuat solidaritas resiprokal di antara masyarakat dan tidak hanya menguntungkan negara penerima tetapi juga Brasil. Brasil telah mengembangkan kerjasama juga dengan lebih dari seratus negara berkembang.

Brasil mengikuti prinsip Selatan-Selatan dalam menjalankan proyek dan program kerjasama pembangunannya, termasuk menekankan prinsip “*driven (respond to the demands of developing nations); not interfere in beneficiary country internal affairs; and impose no conditionality*”.

Anggaran yang telah disediakan antara 1.426 miliar USD antara tahun 2005-2009. Jumlah tersebut dialokasikan untuk empat bidang utama yaitu organisasi-organisasi internasional, program beasiswa, humanitarian relief, dan kerjasama teknikal.²¹

Proyek-proyek utamanya dengan partner-partner dari Selatan meliputi pertanian dimana *The Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa)* telah memainkan

²¹ Sean Burges. (2014). *Brazilian development cooperation: here to stay, but how strong?*.

peran penting dalam bidang tersebut. Embrapa berafiliasi dengan Kementerian Pertanian, Pasokan dan Suplai Pangan (the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply). Dalam bidang pertanian Brazil telah berbagi kepakaran dalam produksi pangan melalui *genetic improvement; enhanced planting, irrigation and harvest methods*, pemanfaatan mesin-mesin pertanian; hewan ternak, dan pemasaran, termasuk juga membentuk koperasi petani untuk meningkatkan pendapatan kaum petani.

Dalam bidang pertanian, Brasil telah mengembangkan kerjasama dalam sejumlah kebijakan dan program melalui Brazilian Technical Cooperation: Agriculture, Food Security and Social Policies, terutama sejak periode 2011-2012. Program tersebut terdiri dari 24 kursus singkat yang diselenggarakan di Brazil. Negara-negara yang terlibat adalah the Caribbean, Afrika, Asia Tengah dan Tenggara, Pasifik, Eropa Timur dan Kaukasus. Program ini diimplementasikan melalui kemitraan antara ABC dan 20 agensi Brasil yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, lingkungan, perikanan, kesehatan pangan, pembangunan pedesaan dan kebijakan gender.

Gambar 5.1. Situs ABC



Sumber: http://www.abc.gov.br/training/informacoes/ABC_en.aspx.

Gambar 5.1. menunjukkan laman situs yang dikembangkan oleh ABC, yaitu <http://www.abc.gov.br>. Situs tersebut memperlihatkan banyak informasi tentang agensi ABC termasuk proyek dan program dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agensi tersebut.

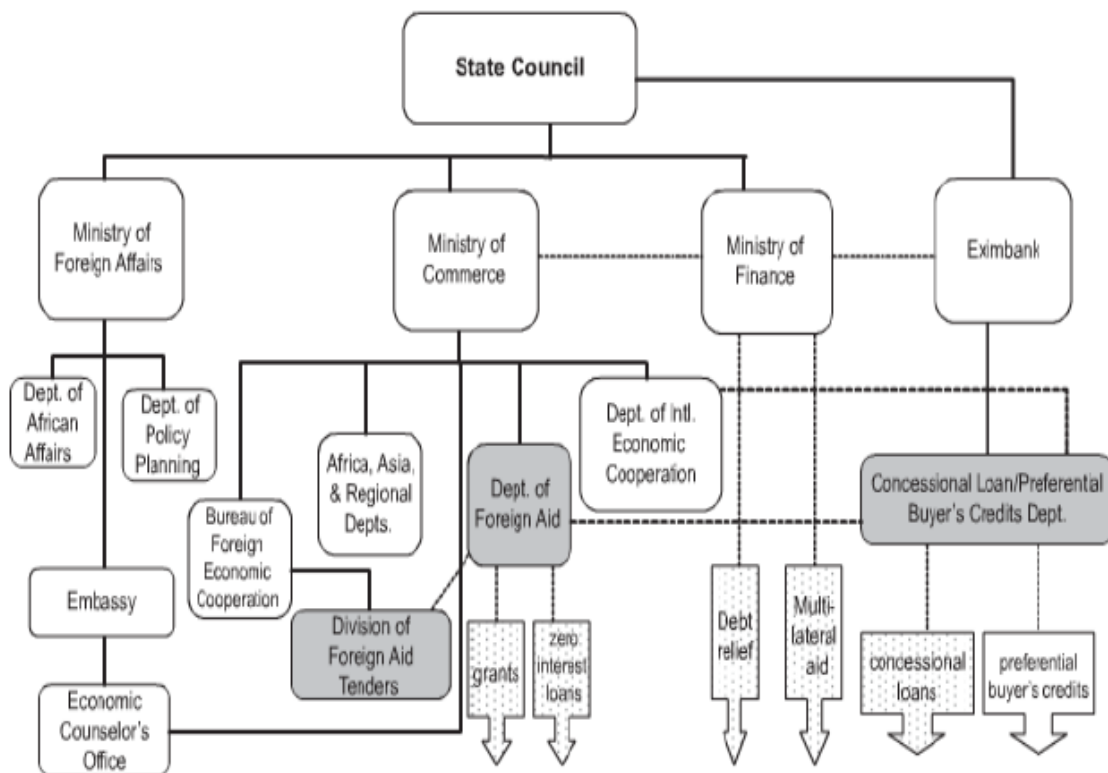
Tabel 5.2. Brazilian Cooperation Agency (ABC)

Name of Cooperation agencies	Flagship Programs	Beneficiary Countries	How beneficiary were chosen?	Model/Approach	Unique Characteristics
Brazilian Cooperation Agency (ABC)	Embrapa (Brazilian Agricultural Research Corporation), Cotton 4 and Rice Project in Senegal, More Food Africa, ProSavana, Food Purchase Programme (PAA-Africa) Fiocruz - Oswaldo Cruz Foundation, SENAI - National Service for Industrial Training	Lusophone countries (Portuguese former colonies): Angola, Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Sao Tome, and Principe, East Timor African countries: Burkina Faso, Chad and Mali, Senegal, Latin America and the Caribbean: Guyana, Suriname, Haiti, Peru, Haiti, Cuba, Paraguay, Colombia, Ecuador	Brazil's foreign aid program is demand driven aid from the recipient went through the notice of Ministry of Foreign Affairs. The request will be addressed to ABC, which then mobilise government bodies and civil servant with relevant expertise	Southern Model	Brazil's foreign aid program is addressed for countries that have had a similar development experience with Brazil. Through this similarity, it provides a basis for Brazil to encourage the use of programs and policies once experienced and internally discussed within Brazil

2. Department of Foreign Assistance of the Ministry of Commerce (MOFCOM) – China

Terdapat tiga kementerian yang memegang kontrol atas bantuan luar negeri China, yaitu Kementerian Perniagaan, Kementerian Luar Negeri dan Eximbank of China. Kabinet China (Dewan Negara) melakukan pengawasan dan menyetujui anggaran, hibah dan proyek-proyek bantuan dengan sejumlah tertentu dan bantuan ke negara-negara yang sensitive secara politik. Kementerian Keuangan menangani penyaluran bantuan ke organisasi-organisasi multilateral.²²

Gambar 5.2. Struktur Penyaluran Bantuan Luar Negeri China



Sumber: UNDP, *China's Aid Flow and Mechanism*, Issue Brief, Juni 2013.

Namun dalam urusan bantuan luar negeri tersebut, Kementerian Perniagaan, menjadi penanggung jawab utama bantuan luar negeri China. Departemen Bantuan Luar Negeri (Departemen of Foreign Assistance) dibentuk dalam Kementerian Perniagaan

²² Analysis: Behind China's aid structure, IRIN, 27 September 2013.
<http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=98772>

(Ministry of Commerce) untuk memformulasikan dan mengimplementasikan rencana dan kebijakan-kebijakan bantuan luar negeri, untuk mempercepat reformasi metode bantuan luar negeri China, untuk mengorganisasikan negosiasi-negosiasi menyangkut bantuan luar negeri dan menandatangani perjanjian terkait, untuk menangani urusan bantuan antar pemerintahan, serta memformulasikan rencana bantuan luar negeri, melakukan supervise dan inspeksi terhadap implementasi proyek-proyek bantuan luar negeri.²³ Kementerian Perniagaan juga memegang kewenangan atas semua hutang tanpa bunga dan hibah. Dalam hal penyaluran bantuan luar negeri, Kementerian Luar negeri berkoordinasi dengan MOFCOM untuk memutuskan alokasi bantuan.²⁴

Saat ini China memberikan delapan bentuk bantuan luar negeri, yaitu: *complete projects, goods and materials, technical cooperation, human resource development cooperation, medical teams, emergency humanitarian aid, debt relief, and an overseas volunteer program*.²⁵ Mayoritas bantuan China diberikan dalam bentuk *Complete Projects*. Dana yang dihabiskan sekitar 40% dari seluruh dana untuk bantuan luar negeri China. Proyek ini mengacu pada proyek-proyek produktif dan sipil yang dibangun di negara-negara penerima dengan bantuan sumber-sumber finansial dari China sebagai hibah atau hutang tanpa bunga. China bertanggung-jawab untuks seluruh atau sebagian prosesnya, dari studi, survey, design dan konstruksi, menyediakan seluruh atau sebagian peraltan dan material bangunan. China juga dapat mengirim para insinyur dan personil teknikal untuk mengorganisasikan dan mendampingi konstruksi, instalasi dan uji coba produksi proyek-proyek tersebut. Setelah proyek selesai, China akan menyerahkannya ke negara penerima (recipient country).²⁶

Bidang-bidang yang digarap dalam bantuan luar negeri China meliputi agrikultur, industri, infrastruktur ekonomi, fasilitas publik, pendidikan, pelayanan kesehatan. Fokusnya adalah meningkatkan produktivitas industrial dan agrikultural negara-negara penerima bantuan, meletakkan dasar yang solid bagi pembangunan ekonomi dan sosial, dan meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Penanganan perubahan iklim juga menjadi perhatian dalam tahun-tahun terakhir ini. Bantuan pertanian meliputi

²³ Detil tentang bentuk-bentuk bantuan ini dapat dilihat di <http://english.mofcom.gov.cn/departments/yws2/>

²⁴ Seringkali terjadi ketegangan di antara kedua kementerian tersebut dalam fungsi koordinasi ini. Ketegangan ini berdampak pada kebijakan bantuan luar negeri. Sebagai tambahan terdapat jua 23 kementerian lain dan komisi-komisi yang berperan dalam penyaluran bantuan luar negeri, seperti Kementerian Pendidikan dan kementerian Kesehatan. Kementerian Pendidikan menangani beasiswa untuk studi di China, sementara Kementerian Kesehatan menangani dana program pendidikan di luar negeri.

²⁵ Rong Xiang (2012) Regulation of Foreign Aid: China. <http://www.loc.gov/law/help/foreign-aid/china.php>.

²⁶ http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/21/c_13839683_6.htm

pembangunan lahan pertanian, pusat-pusat demonstrasi agro-teknology, dan stasiun-stasiun eksperimen dan promosi agro-technology; pembuatan saluran irigasi dan proyek konservasi air; mensuplai mesin-mesin pertanian; mengirim ahli-ahli pertanian untuk memanfaatkan teknologi tersebut dan menyediakan konsultasi pembangunan pedesaan dan pelatihan tenaga pertanian.

Bantuan industri yang telah menjadi bagian penting dari bantuan China telah dilakukan sejak tahun 1950an dan meningkat sangat besar sejak 1970an. Dalam bidang ini China membantu mempromosikan produksi dan pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pajak dan penerapan pasar. China juga membantu pembangunan proyek-proyek produksi industrial seperti permesinan, tekstil, serta material-material konstruksi, dan industri energi.

Infrastruktur ekonomi merupakan bidang ketiga yang menjadi perhatian bantuan luar negeri China. China membantu pembangunan sarana transportasi, komunikasi, suplai energy, dll. Fasilitas publik yang dibangun meliputi sarana perkantoran pemerintahan, bangunan-bangunan sipil, sumur untuk suplai air, pusat-pusat konferensi, pusat olahraga dan budaya, serta fasilitas-fasilitas untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, bantuannya diantaranya meliputi membangun sekolah-sekolah, penyediaan sarana dan material pendidikan, pengiriman guru-guru, pelatihan guru dan pemagangan di negara-negara berkembang lain serta tawaran beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa belajar di China. Bantuan di bidang kesehatan meliputi pembangunan rumah sakit dan pusat-pusat layanan kesehatan, membangun pusat-pusat pencegahan dan perawatan penyakit Malaria; pengiriman tenaga kesehatan; pelatihan pekerja di bidang kesehatan; menyediakan obat-obatan dan material kesehatan lainnya. Di bidang energi bersih dan penanganan perubahan iklim, China membantu pengembangan sumber-sumber energi bersih seperti gas and small hydropower stations. China membantu penggunaan sumber-sumber air lokal untuk membangun pusat-pusat tenaga air dan proyek-proyek transmisi power untuk memenuhi kebutuhan listrik orang-orang lokal dan juga produksi agrikultural dan industri.

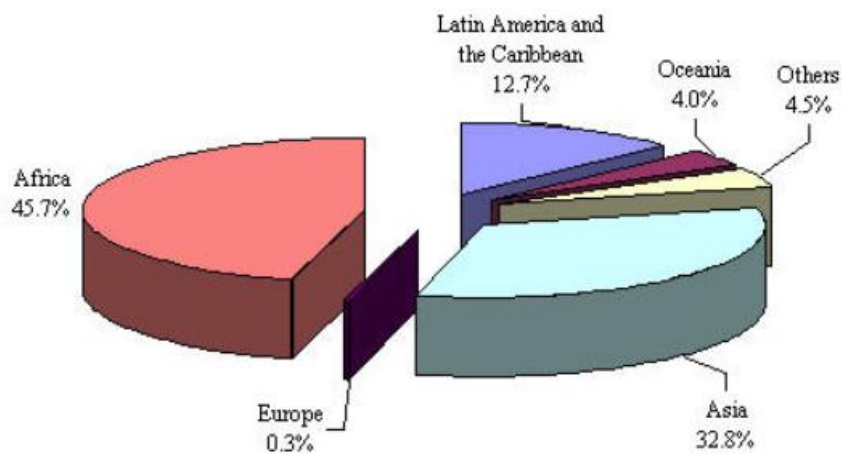
Gambar 5.3. Situs Internet Departemen Bantuan Luar Negeri MOFCOM China



Sumber: <http://english.mofcom.gov.cn/departments/yws2/>

Pada tahun 2009, negara-negara penerima bantuan dari China sebagian besar adalah negara-negara Afrika yang jumlah mencapai lebih dari 45 %, disusul negara-negara di Asia sebesar 32%.

Gambar 5.4. Negara Penerima Bantuan dari China



Sumber: UNDP, *China's Aid Flow and Mechanism*, Issue Brief, Juni 2013, mengutip Braughtigam (2009). *The Dragon's Gift*. Oxford: OUP, hal. 19.

Tabel 5.3. Department of Foreign Assistance – MOFCOM - China

Name of Cooperation agencies/ Struktur	Flagship Programs	Beneficiary Countries dan bagaimana diseleksi?	Model/Approach	Unique Characteristics	Budget
<p>DFA – MOFCOM/ Di dalam MOFCOM;</p> <p>Kabinet China (Dewan Negara) melakukan pengawasan dan menyetujui anggaran, hibah dan proyek-proyek bantuan dengan sejumlah tertentu dan bantuan ke negara-negara yang sensitive secara politik. Kementerian Keuangan menangani penyaluran bantuan ke organisasi-organisasi multilateral</p>	<p>Agrikultur, industri, infrastruktur ekonomi, fasilitas publik, pendidikan, pelayanan kesehatan.</p> <p>Fokus: Meningkatkan produktivitas industrial dan agrikultural negara-negara penerima bantuan, meletakkan dasar yang solid bagi pembangunan ekonomi dan sosial, dan meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan.</p> <p>Penanganan perubahan iklim Bantuan pertanian meliputi pembangunan lahan pertanian, pusat-pusat demonstrasi agro-technology, dan stasiun-stasiun eksperimen dan promosi agro-technology; pembuatan salurn irigasi dan proyek konservasi air; mensuplai mesin-mesin pertanian; mengirim ahli-ahli pertanian untuk memanfaatkan teknologi tersebut dan menyediakan konsultasi pembangunan pedesaan dan pelatihan tenaga pertanian.</p>	<p>Negara-negara Afrika (45%); Negara-negara Asia (32,8%).</p> <p>Sisanya negara-negara di Amerika Latin dan Karibia, Oceania dan Eropa.</p> <p>Tidak ada informasi bagaimana beneficiary countries diseleksi</p>	<p>Southern Model ala China</p>	<p>Delapan bentuk bantuan luar negeri, meliputi <i>complete projects, goods and materials, technical cooperation, human resource development cooperation, medical teams, emergency humanitarian aid, debt relief, and an overseas volunteer program</i></p>	<p>Pada tahun 2013, bantuan (mencuculkan pinjaman konsesional) sebesar 3,23 miliar USD (atau 19,8 miliar RMB). Concessional loans dari Eximbank diperkirakan mencapai 1,96 miliar USD (12 miliar RMB). Angka tersebut tidak termasuk debt relief.*</p>

)* Sumber khususnya dari UNDP, *China's Aid Flow and Mechanism*, Issue Brief, Juni 2013.

3. Korea International Cooperation Agency (KOICA)

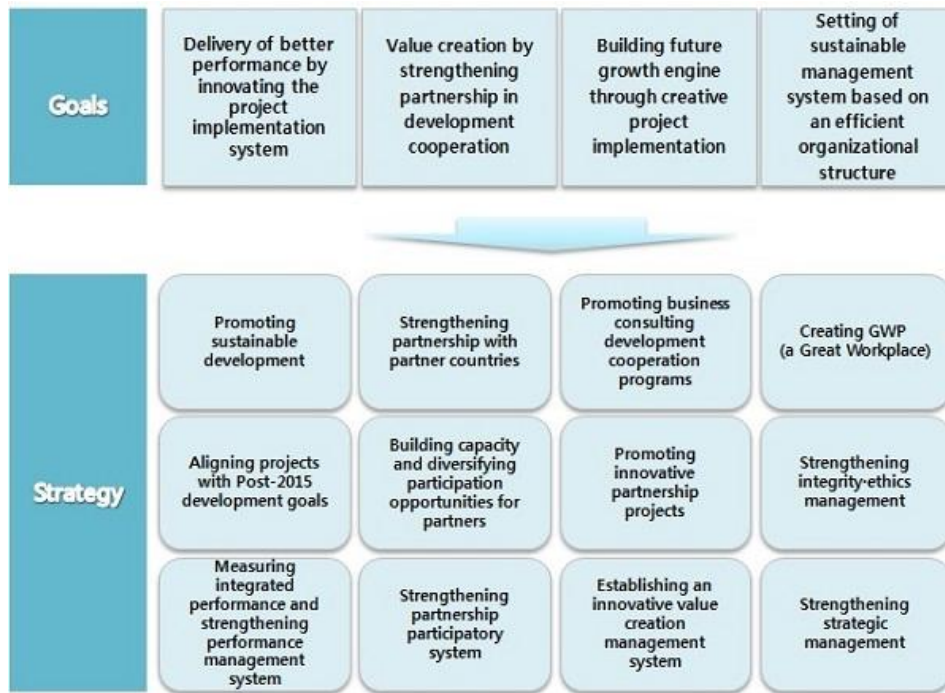
KOICA dibentuk tahun 1991 dengan tujuan untuk mengelola bantuan hibah dan program-program kerjasama teknis.²⁷ KOICA memiliki 30 kantor perwakilan di 28 negara mitra. Kantor perwakilan tersebut memainkan peran penting dalam melaksanakan program-program bantuan KOICA di lapangan. KOICA secara terus menerus mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan permintaan negara-negara mitra melalui dialog kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan. KOICA juga melakukan survey melalui kedutaan-kedutaan dan kantor-kantor perwakilan di luar negeri.

Bantuan pembangunan Korea dibedakan dalam tiga jenis yaitu: 1) hibah bilateral; 2) hutang bilateral dan 3) bantuan multilateral. Bantuan hibah bilateral terdiri dari kerjasama teknis dan beragam transfer (dalam bentuk tunai, barang ataupun jasa) yang tidak harus dikembalikan. Hutang bilateral diberikan dengan syarat konsesional dengan kerangka Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi (Economic Development Cooperation Fund (EDCF)). Bantuan multilateral diberikan baik sebagai financial subscription atau (hibah) kontribusi organisasi internasional. Dalam hal ODA ini, KOICA bertanggung jawab untuk bantuan hibah bilateral dan program-program kerjasama teknis. Sementara pengadministrasian EDCF ditangani oleh Korea Export-Import Bank (Korea Eximbank). Bantuan hibah bilateral menghabiskan sekitar 40% dari total anggaran ODA bilateral yang telah ditetapkan pemerintah Korea.

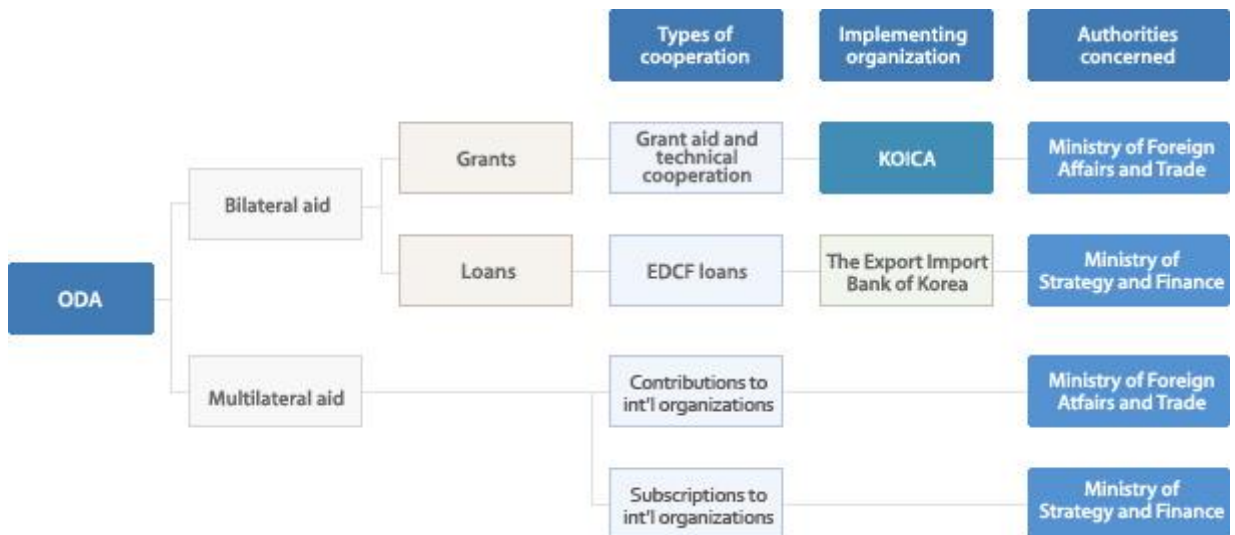
Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (The Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT) and the Ministry of Strategy and Finance/MOSF bertanggung jawab untuk mengelola bantuan multilateral.

²⁷ <http://www.koica.go.kr/english/main.html>

Gambar 5.5. Tujuan dan Strategi Kerjasama Pembangunan Internasional Korea



Gambar 5.6. Jenis-jenis bantuan Korea

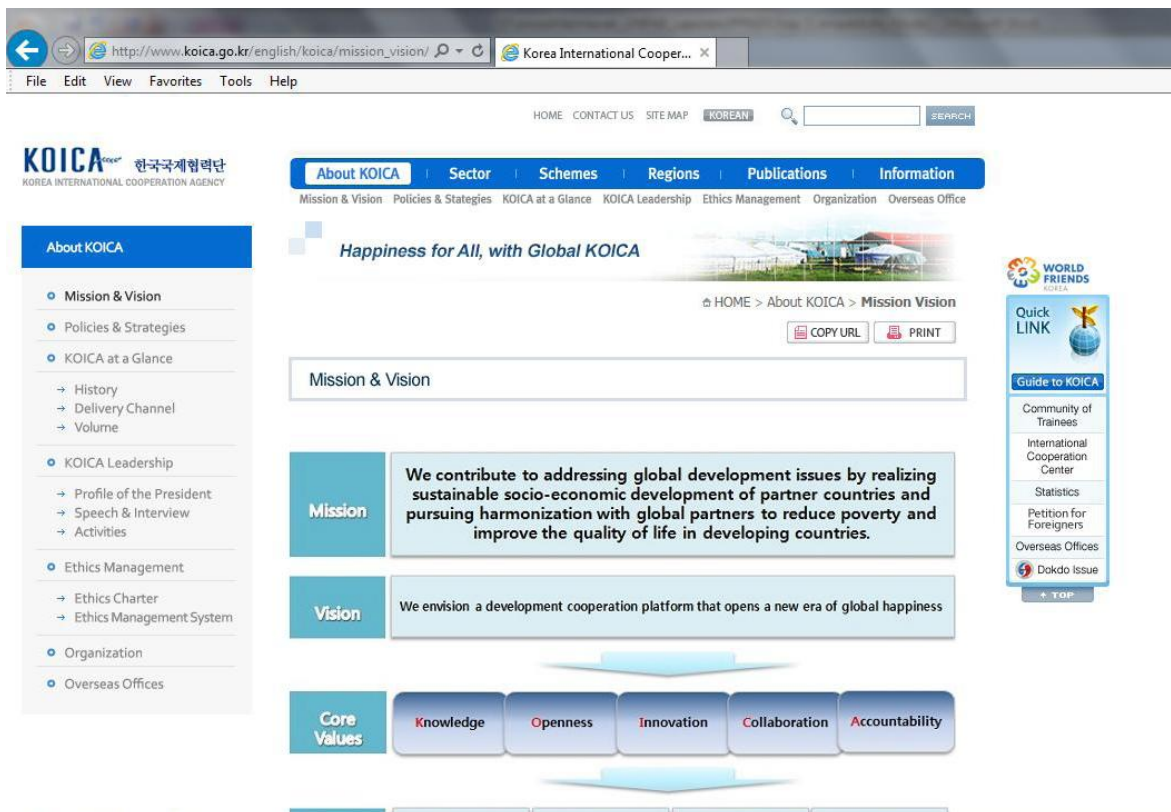


Total bantuan Korea antara tahun 2001-2013 berjumlah 10,7 miliar USD. Peningkatan terjadi khususnya antara tahun 2008 dan 2013, mencapai 116,9%. Dalam periode tersebut, volume bantuan bilateral mencapai 140,8%. Pada tahun 2013, ODA Korea berjumlah 1.740,2 juta USD. Jumlah ini mencapai 0,13% dari the GNI, dan

memperlihatkan peningkatan sebesar 216,9% dibandingkan tahun 2008. Bantuan hibah sendiri mencapai 12.249,8 juta USD dalam periode 1991 dan 2013.

Peningkatan ODA ini dimaksudkan untuk memperkuat peran Korea dalam komunitas internasional. Korea berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Korea juga berencana untuk membangun system kerjasama pembangunan yang efisien dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan kapasitas dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara penerima bantuan.

Gambar 5.7. Situs Internet KOICA



Sumber: http://www.koica.go.kr/english/koica/mission_vision/index.html

Tabel 5.4. Korean International Cooperation Agency (KOICA)

Name of Cooperation agencies	Flagship Programs	Beneficiary Countries	How beneficiary were chosen?	Model/Approach	Unique Characteristics
Korean Interational Cooperation Agency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expertise sharing through International Development Exchange Program (IDEP) in 1982. 2. Economic Development Cooperation Fund (EDCF). 3. KOICA's bilateral grant aid (cash, goods, and services) 4. 4. KOICA Mid-Term Strategy on Agriculture, Forestry, and Fisheries (2013-2015) 	<p>Viet Nam, Mongolia, Afghanistan, Phillipines, Cambodia, Indonesia, Bangladesh, Nepal, Ethiopia, Iraq, Sri Lanka, Myanmar, Azerbaijan, Rwanda, Ecuador, Uganda, Paraguay, Uzbekistan, Tanzania, Peru</p>	<p>There is no detailed criteria or defined process of how the beneficiaries are chosen. One matter for sure is, in order to maximise the effectiveness of Korea's development cooperation program, KOICA continiously collects and updates information on the needs as well as the demands of partner countries through policy dialogues with various stakeholders. The institutin also conducts demand surverys through Korean embassies and KOICA's overseas offices.</p>	<p>DAC Model</p>	<p>- Essentially, KOICA shares the same goals with the Western Aid, poverty eradication and education, gender promotion, and South Korea also shares the same values, democratization, open government, accountability. However, KOICA's programs are intellectual and knowledge knowledge-based. The second one is more human character: with the heart and sincerity. Engaging on the ground more, through kinship with those people and more direct engagement with recipients, being friends with them. - Furthermore, KOICA's development program has gained great support from its citizen. It can be proven through the formation of World Friends Korea in 2009 as the Korean government consolidated overseas volunteer programs. To date, World Friends Korea has deployed 20,000 overseas volunteers to partner countries from 2009 to 2014. World Friends Korea is operating a wide range of volunteer programs to engage high schools graduates to retirees. Surprisingly though, KOICA's development programs have been focusing on rural development, it appears that World Friends Korea's volunteers have been mainly participating on education development program Other KOICA's development program that involves its citizen is The KOICA Fellowship Program with main projects to support partner countries in securing human resources for their development. The primary objective of the Fellowship Program is to share important technical skills and knowledge as well as to build capacities for sustainable socio-economic development.</p>

4. Turkish Cooperation and Development Agency (TIKA)

TIKA dibentuk pada bulan Mei 1999 sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam mengelola bantuan luar negeri Turki ke negara-negara berkembang lainnya. Organisasi ini berada langsung di dalam kantor Perdana Menteri.

TIKA memiliki 12 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk mengembangkan hubungan ekonomi, komersial, teknikal, social budaya dan pendidikan dengan negara-negara yang menjadi sasaran kerjasama. Kerjasama ini didasarkan pada proyek-proyek dan aktivitas yang dapat juga berkontribusi pada pembangunan yang saling menguntungkan. Dan untuk menyiapkan program-program kerjasama yang sejalan dengan tujuan dan kebutuhan di negara-negara tujuan. Untuk itu TIKA dapat menjalankan organisasi dan menindaklanjuti proses dan koordinasi dalam penerapannya.

Fungsi kedua adalah menyiapkan perangkat infrastruktur ekonomik dn mendukung program yang dibutuhkan oleh negara-negara sasaran kerjasama selama proses pertumbuhan ekonomi. Fungsi TIKA juga dimaksudkan untuk berkontribusi dalam bidang-bidang pertumbuhan ekonomi, persiapan dan pembangunan lingkungan investasi, praktik tata kelola yang baik, peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan komunitas. TIKA juga berperan dalam mendukung peningkatan kapasitas institusional, sumber daya manusia dan kapasitas lainnya.

Ketiga, TIKA menjalankan fungsi koordinasi dalam bantuan kemanusiaan dan dukungan teknikal ke negara-negara dan komunitas internasional jika dibutuhkan. Fungsi keempat TIKA adalah merealisasikan program-program, proyek dan aktivitas kerjasama dnegna institusi-institusi publik, universitas, sektor non-governmental dan swasta di negara-negara tujuan. Jika diperlukan TIKA dapat mengirimpkn pakar untuk mendukung aktivitas-aktivitas tersebut.

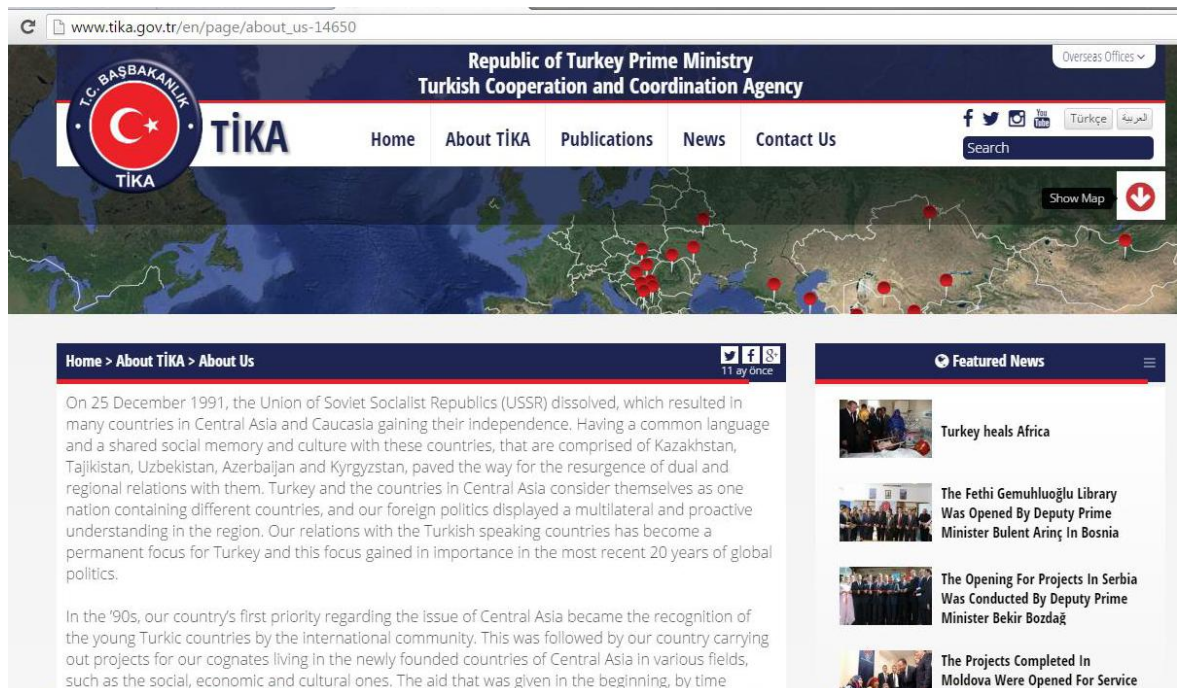
Fungsi kelima adalah untuk menyiapkan proyek-proyek dan program-program penguatan kerjasama dalam bidang administrasi public, hokum, pendidikan, budaya dan bidang-bidang social lainnya. TIKA juga mengelola pemberian beasiswa dan mendukung pegawai-pegawai public untuk dikirim ke Turki dalam program magang atau pelatihan. Fungsi keenam adalah menjalankan program kerjasama budaya di luar negeri, termasuk bekerjasama dengan pusat-pusat aktivitas yang memiliki kepedulian tentang budaya Turki. Fungsi ketujuh adalah menindaklanjuti, menyiapkan inventaris dan mempublikasikan laporn terkait aplikasi dan koordinasi teknikal tentang bantuan pembangunan dan bantuan luar negeri Turki.

TIKA juga berfungsi untuk mengaplikasikan proyek-proyek social kultural dan studi di luar negeri dengan tujuan untuk melindungi warisan sejarah, budaya dan social, serta warisan nilai-nilai. Ini dilakukan untuk menghapuskan prasangka komunal dan memperkuat dialog antar peradaban.

TIKA terlibat dalam upaya kerjasama internasional sesuai dengan bidangnya dan memastikan koordinasi, serta menjalankan proyek-proyek bersama dengan organisasi-organisasi internasional dan agensi-agensi mereka. TIKa bekerjasama dengan negara-negara tujuan dalam menyediakan kontribusi teknikal dan mendukung negara-negara yang memiliki ikatan sejarah, geografis, social dan budaya. Juga mengevaluasi permintaan semua negara yang bersedia bekerjasama.

TIKA memberikan informasi kepada Dewan Penasihat (the Advisory Board) terkait kerjasama dan proyek-proyek bantuan yang akan dilibatkan dalam program-program aktivitas direktorat tersebut. TIKa juga dapat menjalankan tugas dan pelayanan jika diminta oleh direktora tersebut sesuai dengan perundang-undangan.

Gambar 5.8. Situs Internet Turki



Sumber: <http://www.tika.gov.tr>.

Tabel 5.5. Struktur dan Fungsi TIKA

Struktur dan tanggung jawab*	Fungsi -- Objectives	Beneficiary countries	Anggaran
<p>Organisasi TIKA berada di bawah kantor Perdana Menteri. Perdana Menteri memiliki kewenangan untuk menjalankan otoritas terkait dengan administrasi TIKA.</p> <p>Memiliki 42 kantor di luar negeri termasuk Myanmar dan Philipina.</p> <p>Memiliki status hukum publik tersendiri dan anggaran khusus untuk mempromosikan negara-negara dan komunitas yang menjadi target kerjasama dalam proyek-proyek dan program-program ekonomi, komersial, teknikal, sosial, kultural dan pendidikan.</p> <p>Dikepalai oleh: Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>Tanggungjawab: Organisasi memberi laporan ke Wakil Perdana Menteri Sebagai a legal entity of its own</p>	<p>a) To develop economic, commercial, technical, social, cultural and educational relations with target countries b) To prepare the economic infrastructure tools and support programs that are required for the target cooperation countries and communities c) When necessary, to coordinate humanitarian assistance and technical support to be made to foreign countries and communities. d) To realize programs, projects and activities in cooperation with public institutions, universities, non-governmental and private sector establishments of national and beneficiary countries e) To prepare and have prepared projects and programs for reinforcing co-operations within the scope of public administration, law, education, culture and other social fields in the country to provide scholarships and similar support for public officials and other individuals to be sent to Turkey from these countries and communities for the purpose of an internship or training. f) To conduct cultural cooperation programs abroad g) To provide follow –up, prepare inventory and publish reports concerning the application and technical coordination on development assistance and our country’s foreign aids. h) To apply social and cultural projects and studies abroad with the objective of protecting common historical, cultural and social heritages and values, eliminating inter-communal prejudices and strengthening dialogue between civilizations. i) To be involved in international co-operation efforts relevant to its task field and ensure coordination, and if necessary, to conduct projects jointly with international organizations and their agencies. j) In addition to cooperating with the targeted countries, providing technical contributions and support to countries with which we have historical, geographical, social and cultural ties regardless of their level of development, and to evaluate requests from all countries that are open to co-operation. k) To provide information to the Advisory Board concerning the co-operation and assistance projects that will be included within the scope of the Directorate’s activity program. l) To perform the other duties and services which are assigned to the Directorate by legislation.</p>	<p>120 negara, termasuk di 38 cooperation partner countries. Prioritas di negara-negara Asia Tengah. Pembentukan TIKA dilatarbelakangi dengan perkembangan di Asia Tengah pasca runtuhnya Uni Soviet; untuk menjalankan proyek-proyek di Turkish cognates yang tinggal di negara-negara yang baru terbentuk di Asia tengah tersebut.</p>	<p>273 juta USD (2011) 85 juta USD (2002)</p>

Keterangan:)* Awalnya berada dalam Kementerian Luar Negeri dari 24 Januari 1992 hingga 28 Mei 1999 – sebagai *technical aid organization*

5. South African Development Partnership Agency (SADPA)

SADPA dibentuk pada bulan April 2013 di dalam Kementerian Hubungan dan Kerjasama Internasional. Kerjasama pembangunan internasional ditekankan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Afrika Selatan.

Fungsi SADPA meliputi (1) mengembangkan garis-garis besar kerjasama pembangunan Afrika Selatan dan memastikan koherensi dalam implementasinya; (2) mendukung program-program dan proyek-proyek terkait dengan kemitraan kerjasama pembangunan ke luar dan memanfaatkan Dana untuk mendukung program-program dan proyek-proyek tersebut; (3) untuk menyediakan saran teknis terkait kebijakan luar negeri di bidang kerjasama pembangunan; (4) membantu dan memelihara kerjasama yang erat dengan agensi-agensi kerjasama internasional dan pemangku kepentingan atas nama Menteri IRCO; (5) mengawasi semua kerjasama dan bantuan pembangunan keluar baik melalui kemitraan bilateral, trilateral dan multilateral dengan negara-negara, institusi-institusi pembangunan, masyarakat CSO dan sektor swasta; (6) melakukan audit akuntabilitas tahunan dan monitoring dan evaluasi semua kerjasama pembangunan keluar Afrika Selatan; (7) memastikan manajemen dan administrasi yang efektif menyangkut Pendanaan Kemitraan untuk Pembangunan (*the Partnership Fund for Development*); (8) mempromosikan dan memasarkan SADPA dan proyek-proyeknya.

Afrika Selatan menyediakan bantuan pembangunan dalam bentuk pendanaan ataupun dukung teknik bagi pembangunan dan atau implementasi sejumlah inisiatif. Program-program unggulan Afrika Selatan ditujukan untuk mendorong integrasi regional termasuk penguatan Uni Afrika, *the Southern African Development Community*, *the Southern African Customs Union* dan inisiatif-inisiatif yang dibuat institusi-institusi tersebut; pembangunan dan implementasi program dan proyek regional dan sub regional; perdamaian, keamanan dan stabilitas, serta rekonstruksi dan pembangunan di wilayah post konflik; penguatan hubungan politik dan sosio ekonomi dengan semua negara di Afrika dan dengan mitra-mitra Selatan; mempromosikan tata kelola yang baik di Afrika; dan penyediaan bantuan kemanusiaan.

Budget yang dianggarkan adalah sebesar 70 - 90 juta USD.

Gambar 5.9. Situs Internet SADPA – Afrika Selatan

The screenshot shows the official website of the Department of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa. The page features a header with the department's logo and name, a green banner with the text 'Welcome to the official website', and a navigation menu with links for 'home', 'contact us', and 'site map'. Below the navigation menu, there are several categories of links: 'About the Department', 'About South Africa', 'News and Events', 'Foreign Relations', 'Websites of SA Missions', 'Consular Information', 'State Protocol', 'Employment Information', and 'African Union & NEPAD'. The main content area is titled 'News and Events' and contains a section for 'Progress made with the establishment of the SA Development Partnership Agency; South Africa's role; partner countries; objectives; role of each partner; scope of the development assistance that South Africa will provide through the Agency'. This section includes a quote from the National Council of Provinces, a question number (16 CO17E), and a published date (1-2013 OF 28 FEBRUARY 2013). The question is posed by Mr F Adam (ANC-WC) to the Minister of International Relations and Cooperation. The reply states that progress has been made and provides details about the Business Case for the establishment of SADPA, including supporting documentation like the draft Partnership Fund for Development Bill, the Government Notice on the establishment of SADPA, the Organisational Structure for SADPA, and the Shared Services Agreement with DIRCO. A 'Quick Links' sidebar on the right lists various resources such as Media Statements, Speeches, Events Calendar, National Reports, International Reports, Parliament Questions and Replies, White Papers, Green Papers, Legislation and Acts, Tender Bulletins, and Regulations.

Sumber: <http://www.dfa.gov.za/docs/2013pq/pq16ncop.html>

Gambar 5.9. menunjukkan laman situs yang dikembangkan oleh DPA, yaitu <http://www.dfa.gov.za/docs/2013pq/pq16ncop.html>. Namun situs tersebut tidak menyediakan banyak informasi tentang proyek dan program dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agensi tersebut.

Tabel 5.6. South African Development Partnership Agency (SADPA)

Name of Cooperation agencies/ Struktur	Flagship Programs	Beneficiary Countries dan bagaimana diseleksi?	Model/Approach	Unique Characteristics	Budget
<p>South African Development Partnership Agency (SADPA)</p> <p>Di dalam Kementerian Hubungan dan Kerjasama Internasional.</p>	<p>Program-program unggulan Afrika Selatan ditujukan untuk mendorong integrasi regional termasuk penguatan Uni Afrika, <i>the Southern African Development Community, the Southern African Customs Union</i> dan inisiatif-inisiatif yang dibuat institusi-institusi tersebut; pembangunan dan implementasi program dan proyek regional dan sub regional; perdamaian, keamanan dan stabilitas, serta rekonstruksi dan pembangunan di wilayah post konflik; penguatan hubungan politik dan sosio ekonomi dengan semua negara di Afrika dan dengan mitra-mitra Selatan; mempromosikan tata kelola yang baik di Afrika; dan penyediaan bantuan kemanusiaan.</p>	<p>Tidak ada informasi lengkap, tetapi di antara beneficiary countries adalah: The assistance in the regional peace-building over the past 20 years: in Burundi, the Democratic Republic of Congo (DRC), Sudan, Somalia, and Madagascar, Côte d’Ivoire, Angola and Zimbabwe.</p> <p>Agricultural projects in Zimbabwe, cultural projects in Mali, humanitarian assistance in Somalia, water dams in Lesotho; repay the debts of Comoros, Gabon, Lesotho, Mozambique, Malawi and the Central African Republic.</p> <p>No published information about selection mechanism, but emphasizes on the role of partners, which is: All partners must make a contribution & take responsibility for programme, and results</p>	<p>Southern Model</p> <ul style="list-style-type: none"> •Demand driven priorities – co-crafted; Mainstream issues; capacity focus •People Centred Development – development of societies; benefit people •Partnerships – Co-ownership mutual benefit ; North and South; S-S; and Non-Gov •Catalytic initiatives – quality of prog rather than quality of aid; unlock potential •Development effectives – national ownership, sustainability, capacity generating, Paris Declaration •Results Based Management – results orientated 	<p>Instrumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mainly grants & technical coop. Loans, JVs & PPP’s – with commercial sector •budget, sector, programme, project, basket 	<p>50 juta USD</p>

Sumber: Shoayb Casoo (2012), Amanda Lucey dan Alexander O’Riordan (2014), Besharati (2013), IDS, Policy Briefing (Issue 64, Mei 2014).

6. Development Partnership Administration (DPA) India

DPA dibentuk dalam Kementerian Urusan eksternal pada bulan Januari 2012. Fungsinya adalah untuk menangani proyek-proyek bantuan India melalui penyiapan konsep, peluncuran, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek bantuan tersebut.

DPA memiliki tiga divisi yaitu DPA I, DPA II dan DPA III yang diketuai oleh pejabat-pejabat setingkat Joint-Secretary.²⁸ DPA I menangani penilaian proyek dan jalur kredit, proyek-proyek hibah di kawasan Afrika Timur, Selatan dan Barat, proyek-proyek bantuan hibah perumahan di Bangladesh dan Sri Lanka. DPA II mengurus skema pengembangan kapasitas, penanganan bencana dan program Kerjasama Teknik dan Ekonomi (the Indian Technical and Economic Cooperation Program). DPA II menangani pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan di bawah tanggung jawab ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation Programme)/SCAAP (Special Commonwealth Assistance for Africa Programme)/TCS dari Colombo Plan selama periode 2012-13. Pelatihan ini melibatkan 161 negara mitra. Terdapat 280 kursus yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh empatpuluh tujuh lembaga terkait. DPA II juga menangani proyek-proyek bantuan hibah di Asia tenggara, Asia tengah, Asia Barat dan negara-negara Amerika Latin. DPA juga mengurus bantuan kemanusiaan dan bencana. DPA III menangani implementasi proyek bantuan hibah di Afghanistan, Maldives, Myanmar, Nepal and Sri Lanka.²⁹

Prinsip pemberian bantuan yang diadopsi India adalah bahwa kemitraan pembangunan didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan negara-negara mitra. Kementerian Urusan Eskternal berupaya untuk mengakomodasi sebanyak mungkin permintaan yang diterima dari negara-negara mitra sejauh memungkinkan secara teknik maupun finansial.³⁰

Anggaran yang dialokasikan untuk bantuan luar negeri telah meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013-2014, Indonesia mengalokasikan hampir 1,3 miliar dolar. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar empat kali lipat dibandingkan jumlah yang diberikan pada sepuluh tahun sebelumnya (2003-2004). Sepanjang empat tahun terakhir, jumlah anggaran bantuan luar negeri Indonesia telah meningkat sebesar 32 persen setiap

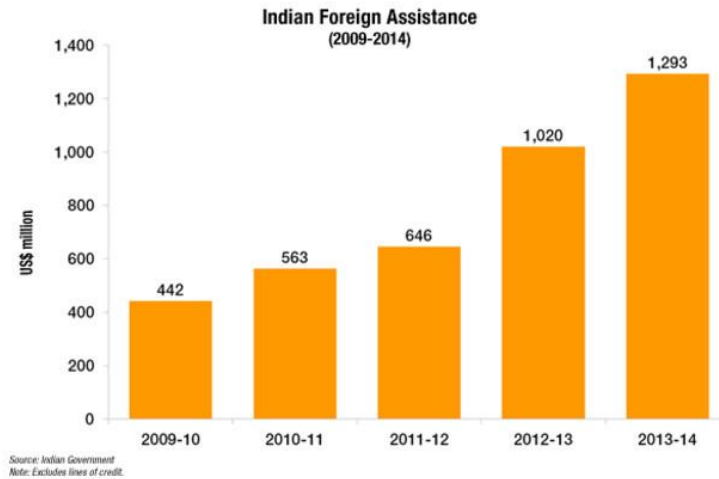
²⁸ <http://mea.gov.in/development-partnership-administration.htm>.

²⁹ Harsh Jaitli and Jyotsna Mohan, "Understanding the South-South Cooperation Dynamic in Relation to India's aid Policy." *India's Global Footprints*, November 2013, published with the support of Heinrich Boll Stiftung Foundation, India, accessible at <http://in.boell.org/2014/02/05/indias-global-footprints>.

³⁰ <http://mea.gov.in/development-partnership-administration.htm>

tahunnya. Ini menggambarkan komitmen India untuk menjadi ‘emerging donor’, sekalipun status India masih tetap merupakan penerima bantuan luar negeri terbesar juga.³¹

Gambar 5.10. Anggaran Bantuan Luar Negeri India

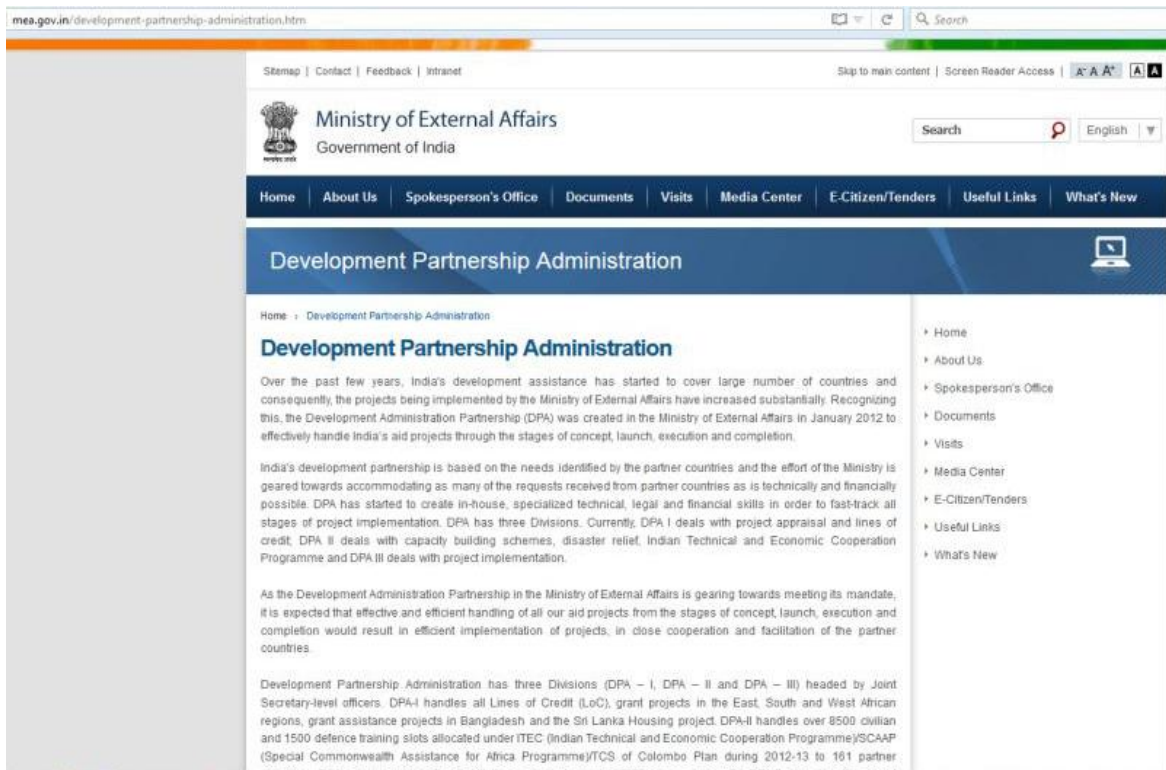


Gambar 5.11. menunjukkan laman situs yang dikembangkan oleh DPA, yaitu <http://mea.gov.in/development-partnership-administration.htm>. Situs tersebut merupakan bagian dari situs Kementerian Luar Negeri India. Situs tersebut tidak memperlihatkan banyak informasi tentang proyek dan program dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agensi tersebut, selain informasi standard tentang DPA sebagai bagian dalam Kementerian Urusan Eksternal. Situs SADPA memberikan external link ke Situs yang dikembangkan Divisi II dari SADPA yaitu Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC) (Lihat Gambar 5.12).

Situs ITEC memuat informasi yang relatif lebih lengkap tentang negara-negara mitra, program-program, misi India dan prosedur aplikasi untuk program yang ditangani oleh Divisi II SADPA terkait dengan semua program capacity building termasuk the Indian Technical & Economic Cooperation Programme (ITEC), Special Commonwealth Assistance for Africa Programme (SCAAP) and Technical Cooperation Scheme (TCS) of Colombo Plan schemes.

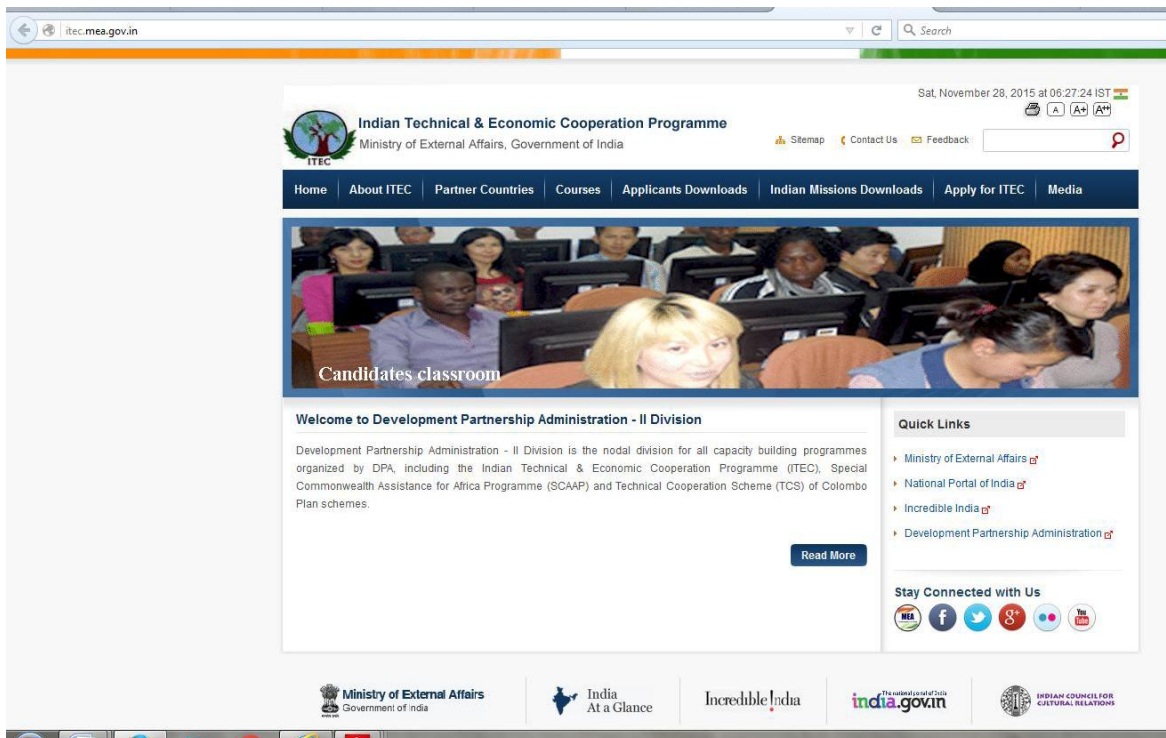
³¹ <https://www.devex.com/news/india-s-foreign-aid-program-catches-up-with-its-global-ambitions-80919>

Gambar 5.11. Situs Internet DPA



Sumber: <http://mea.gov.in/development-partnership-administration.htm>

Gambar 5.12. Situs Indian Technical & Economic Cooperation Program



Sumber: <http://itec.mea.gov.in/>.

Tabel 5.7. Development Partnership Administration (DPA)

Name of Cooperation agencies/ struktur	Flagship Programs	Beneficiary Countries	How beneficiary were chosen?	Model/Approach	Unique Characteristics
<p>Development Partnership Administration (DPA) Di dalam Kementerian Luar Negeri.</p> <p>DPA memiliki 3 divisi yang masing-masing menangani program/proyek tertentu dan kawasan tertentu. Divisi tersebut dikepalai oleh Joint Secretary.</p>	<p>Lines of Credit (LoC), grant projects, Grant assistance projects, Housing project. Civilian and defence training (Courses), Humanitarian and disaster relief.</p>	<p>161 country partners include: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Afghanistan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia - Herzogovina, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cape Verde Island, Cayman Island, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Commonwealth of Dominica, Congo [Republic of], Cooks Island, Costa Rica, Cote D' Ivoire, Croatia, Cuba, Czech Republic, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El-Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kiribati, Korea[DPRK], Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Liberia, Lybia, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malaysia, Maldives, , Mauritania, Mexico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Myanmar, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Poland, Qatar, Republic of Sao Tome, Romania, Russia, Rwanda, Samoa, Senegal, Serbia, Singapura, Slovak Republic, Solomon Island, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, Peru, , St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sudan, South Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad & Tabago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Turks & Caicos Island, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam dan Yemen.</p>	<p>No information about selection mechanism</p>	<p>Southern Model</p>	<p>Divisi struktur DPA dengan kewenangan masing-masing</p>

Sumber: <http://itec.mea.gov.in>

7. Saudi Fund for Development (Arab Saudi)

The Saudi Fund for Development dibentuk tahun 1974 atas dasar Royal Decree No. M/48 tertanggal 14/8/1394 Hijriah atau 1/9/1974 Masehi dan mulai beroperasi pada bulan Maret tahun 1975. Tujuan dasarnya adalah *“to participate in financing of development projects in developing countries through granting of loans to said countries and to encourage national non-crude-oil exports by providing finance and insurance in support of such exports.”*³²

The Saudi Fund memiliki status sebagai suatu *legal entity* yang secara finansial bersifat independent. Strukturnya diketuai oleh Menteri Keuangan yang memimpin enam anggota Dewan Direktur (Board of Directors). Wakil ketua/Managing Directornya memiliki otoritas eksekutif dan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Dewan Direktur.

Ketika mulai beroperasi dana awalnya berjumlah 10 miliar Riyal Saudi. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat menjadi 31 miliar Riyal Saudi pada tahun 1991 karena merespon kebutuhan bantuan dari negara-negara berkembang. Agensi tersebut saat ini berkontribusi dalam pendanaan sekitar 3.750 proyek di 71 negara, termasuk 41 negara-negara Afrika, 25 negara-negara Asia dan lima di kawasan lain.

Syarat-syarat penyaluran dana meliputi (1) Pinjaman tanpa persyaratan; (2) dana tersedia secara cepat dan mudah; (3) pembayaran kembali sangat generous yaitu hingga 50 tahun dengan jangka sepuluh tahun sebagai grace period; (4) komponen hibah dapat mencapai 60 persen dari total dana; (5) biaya pinjaman umumnya satu persen.

Untuk penyaluran pinjaman pendanaan proyek-proyek pembangunan telah ditetapkan sejumlah persyaratan khusus, yaitu:³³ (1) Proyek tersebut harus feasible secara ekonomi dan atau secara sosial; (2). Pinjaman harus dicairkan dan dibayarkan kembali dengan mata uang Riyals Saudi; (3) jumlah pinjaman untuk setiap proyek tidak melebihi 5 persen dari capital Fund ataupun melebihi 50 persen dari total biaya proyek di mana

32

http://www.sfd.gov.sa/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s5dc73d77_7324_4d08_b347_444721019cba/Page2.jsp?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fsdinternet&wc.originURL=%2Fspaces%2Fsdinternet%2Fpage%2FWhat%2Bis%2BISFD&_afLoop=570061920024828#%40%3F_afLoop%3D570061920024828%26wc.originURL%3D%252Fspaces%252Fsdinternet%252Fpage%252FWhat%252Bis%252BISFD%26wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fsdinternet%26_adf.ctrl-state%3Dxsxqx133o_442

33

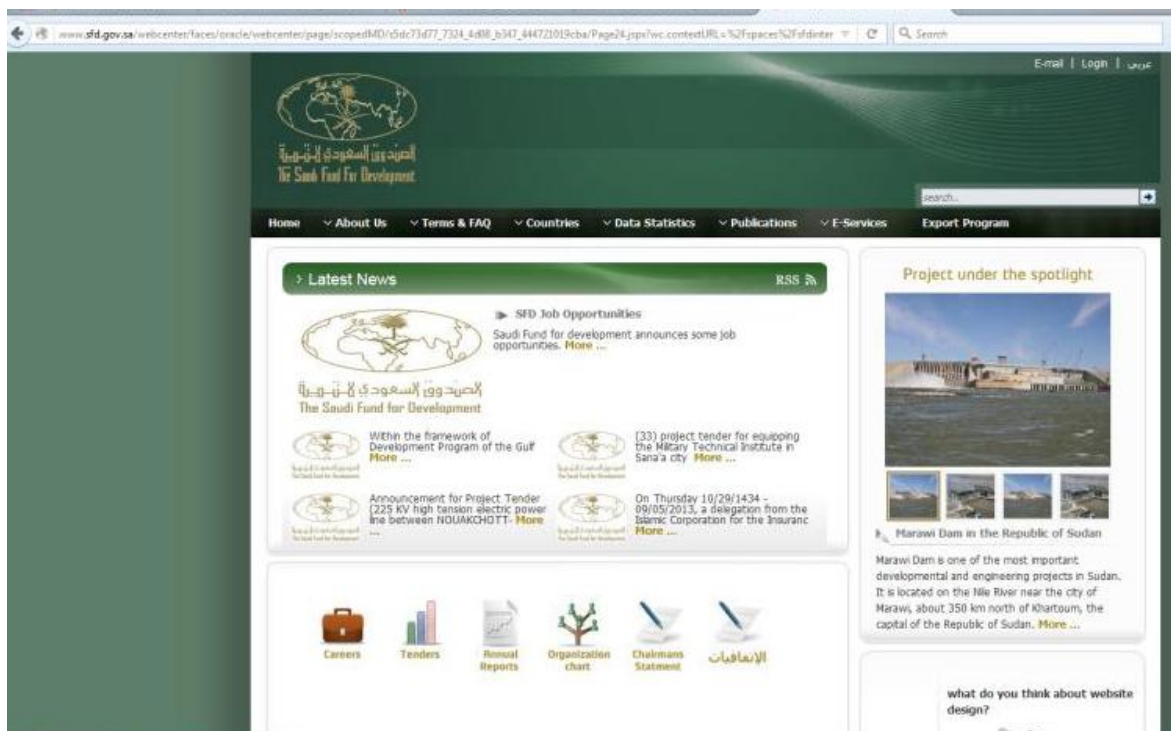
http://www.sfd.gov.sa/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s5dc73d77_7324_4d08_b347_444721019cba/Page3.jsp?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fsdinternet&wc.originURL=%2Fspaces%2Fsdinternet%2Fpage%2FISFD%2BInformation&_afLoop=570125353430424#%40%3F_afLoop%3D570125353430424%26wc.originURL%3D%252Fspaces%252Fsdinternet%252Fpage%252FISFD%252BInformation%26wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fsdinternet%26_adf.ctrl-state%3Dxsxqx133o_592

pinjaman diberikan (The amount of the loan granted for any project should not exceed 5% of the Fund's capital nor exceed 50% of the total cost of the project for which the loan is granted); (4) total pinjaman yang diberikan ke suatu negara tidak melebihi sepuluh persen dari modal Fund yang diberikan setiap kali pemberian (the total amount of loan granted to any country should not exceed 10% of the Fund's capital at any one time).

Khusus untuk kredit ekspor dan asuransi, agensi tersebut juga menetapkan sejumlah persyaratan khusus, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5.8.³⁴

Gambar 5.13. menunjukkan laman situs yang dikembangkan oleh SFD, yaitu <http://www.sfd.gov.sa>. Situs tersebut memperlihatkan banyak informasi tentang agensi SFD termasuk proyek dan program dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agensi tersebut, serta publikasi laporan tahunan. Laporan tahunan terakhir yang tersedia adalah proyek-proyek tahun 2014

Gambar 5.13. Situs Internet SFD – Arab Saudi



Sumber: <http://www.sfd.gov.sa>

³⁴ Ibid.

Tabel 5.8. Saudi Fund for Development (Arab Saudi)

Name of Cooperation agencies	Flagship Programs	Beneficiary Countries	How beneficiary were chosen?	Model/Approach	Unique Characteristics
<p>Saudi Fund for Development (Arab Saudi)</p>	<p>Jangkauan aktivitas meliputi: 1. Pendanaan Proyek-proyek pembangunan 2. Export Credit and Insurance Pada tahun 2014, distribusi sector-sektor yang dibantu pinjaman meliputi: Transportasi dan komunikasi termasuk jalan dan bandara; Power; agrikultur, infrastruktur sosial termasuk pendidikan, kesehatan dan sistem pengairan.</p>	<p>Data tahun 2014: negara-negara Afrika termasuk Senegal, Rwanda, Chad, Mozambique, Guine, Uganda, Burkina Faso, Egypt, Mauritania, Tanzania and Comoros dengan total pinjaman 1.275,7 juta dolar. Negara-negara di Asia termasuk Pakistan, Indonesia, Azerbaijan, Bangladesh dan China, dengan total pinjaman 1.051,75 juta dolar; Dan negara di kawasan lain yaitu Albania dan Kuba dengan total pinjaman 243,75 juta dolar.</p>	<p>Untuk jangkauan pendanaan proyek-proyek pmbanugnan: aktivitasnya tidak terbatas secara geografis, tetapi juga berhubungan langsung dengan pemerintah dari negara-negara berkembang untuk mendanai proyek pembangunan prioritas. Diberikan kepada <i>the least developed and low-income countries</i>. Untuk <i>Export Credit and Insurance</i>, misinya adalah menyediakan pendanaan dan menjamin ekspor non - crude oil nasional.</p>	<p>Arab Saudi</p>	<p>Regulasi penyediaan bantuan dan pendanaan dan penjaminan ekspor nasional adalah 1. Pinjaman pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan, persyaratannya meliputi A. Proyek yang didanai di negara penerima harus terbukti feasible secara ekonomi dan social. B. Pinjaman dicairkan dan dibayar kembali dalam Saudi Riyal. C. Jumlah pinjaman tidak untuk proyek apapun tidak melebihi 5% dari kapital the Fund's ataupun 50% dari total biaya yang dibutuhkan oleh proyek yang didanai. D. Jumlah total pinjaman pada jangka waktu tertentu untuk negara tidak melebihi 10% dari kapital the Fund.</p> <p>2. Untuk mendanai dan menjamin ekspor, persyaratannya adalah: A. Komoditas dan jasa nasional yang eligible dan nilai tambahnya adalah: 1. dapat diserap dalam produk industri olahan, termasuk produk sektor petroleum hilir. Barang-barang industrial dan agrikultural, dan jasa ekspor dan "turnkey projects". 2. Nilai tambah lokal pada komoditas dan jasa yang diekspor seharusnya ekuivalen tidak kurang dari 25%. B. Persentasi Coverage dan syarat pembiayaan: 1. The Fund's financing percentage may reach up to 100% of the export transaction value according to the kind of exports, nature of transaction and the commercial and political risks involved. 2. Jangka waktu pembiayaan bervariasi dari satu hingga 12 tahun. 3. Persentase coverage jaminan dan asuransi ekspor adalah 90% dari total nilai yang tidak dibayar ekspor. C. Mata uang yang dipakai adalah Riyal Saudi Riyal atau dolar AS yang didominasi sebagai nilai mata uang resmi dalam transaksi program. D. Jaminan Pembiayaan Pinjaman: Program memenuhi jaminan untuk mengamankan hak-hak the Fund atas dasar transaksi, risiko dan enitas legal dari pihak-pihak yang terlibat.</p>

Sumber: The Saudi Fund For Development, Annual Report 2014.

5.2. Model-model Kerjasama Pembangunan Internasional

Negara-negara penyedia bantuan luar negeri baru yang tergabung dalam G20 umumnya mengadopsi salah satu dari tiga model kerjasama pembangunan internasional, yaitu (1) Model DAC, (2) Model Arab, dan (3) Model Kerjasama Selatan-Selatan (Southern Model). Tabel 5.9 menyarikan model-model tersebut.³⁵

Tabel 5.9. Model-model Kerjasama Pembangunan Internasional *Emerging Economies* Anggota G20

No	Negara	Model Kerjasama Pembangunan Internasional		
		<i>DAC Model</i>	<i>Arab Model</i>	<i>Southern Model</i>
1	Korea*	V		
2	Turki*	V		
3	Meksiko*	V		
4	Arab Saudi		V	
5	China			V
6	India			V
7	Afrika Selatan			V
8	Argentina			V
9	Brazil			V

Keterangan:

* = anggota OECD (Korea bergabung pada 12 December 1996; Turki pada 2 August 1961, dan Meksiko 18 May 1994); Meksiko dan Argentina tidak termasuk negara yang menjadi fokus analisis ini.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Model DAC adalah pendekatan yang dipakai oleh kelompok negara, terutama yang tergabung sebagai anggota OECD. Pendekatan ini mengadopsi prinsip-prinsip DAC termasuk aturan transparansi dan pelaporan data, karakteristik dan modalitas dalam pemberian bantuan yang sebagian besar sejalan dengan pendekatan DAC. Negara-negara ini juga menyalurkan bantuan mereka melalui lembaga-lembaga multilateral tradisional. Fokus bantuan adalah pada sector-sector sosial dan mengadopsi hubungan donor-recipient klasik. Sejumlah negara *emerging economies* seperti Korea dan Turki telah mengadopsi model ini. Negara-negara diluar G20 seperti dari Eropa Timur juga mengadopsi pendekatan ini.

Pendekatan kedua adalah Model Arab. Negara-negara yang mengadopsi pendekatan ini menjalankan program-program yang memiliki nilai solidaritas sosial dan ikatan religious dan berkonsentrasi pada negara-negara Muslim (terutama Arab). Solidaritas Arab merupakan tujuan utama bantuan internasional, terutama pada tahap-

³⁵ Pembahasan tentang model-model ini diambil dari analisis peneliti yang sudah tertuang dalam Laporan Final Laporan Hibah Kompetisi “Analisis Pengembangan Model Kerjasama Selatan-Selatan” Nopember 2015.

tahap awal. Model ini telah diadopsi oleh negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab sejak tahun 1970an. Maroko, Oman, dan Yaman merupakan negara-negara penerima bantuan terbesar. Kohesivitas dan tingkat koordinasi relative cukup tinggi. Ini membuat model Arab menjadi unik. Kohesivitas ini dibangun atas dasar ikatan kultural, religious dan linguistik bersama. Berbeda dengan pendekatan donor Selatan-Selatan, donor Arab melalui proses bidding yang yang kompetitif. Kompetisi ini memungkinkan pemasok dan kontraktor local untuk mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan. Konsentrasi bantuan lebih banyak pada agenda proyek infrastruktur dalam transportasi, energy dan penyediaan air. Bantuannya secara umum tidak mengikat dan tersedia dengan sedikit kondisionalitas.

Southern Model merupakan model ketiga yang dikembangkan negara-negara donor baru untuk membedakan pendekatan dengan Model DAC. Model ini diadopsi oleh negara-negara yang telah membentuk kerjasama horisontal di antara mereka seperti dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Ini berbeda dengan model DAC yang cenderung lebih vertical di mana bantuan donor memberikan bantuan atau ekspertise mereka pada negara *recipients*. Negara-negara ini lebih menekankan pada keterikatan satu sama lain berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan. Kondisionalitas relatif tidak penting, seperti yang secara tradisional diadopsi oleh model DAC. Yang masuk dalam kategori pengadopsi model Selatan-Selatan ini adalah Brazil, China, India, dan Afrika Selatan. Dalam kasus China, Brautigam (2009) menyebut bahwa bantuan pembangunan dipakai sebagai instrumen untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, dan juga sekaligus tujuan-tujuan politik.

Terdapat perkembangan perspektif menarik yang terjadi dalam lima terakhir. Para pengkaji menemukan gairah baru kajian kerja sama bantuan pembangunan di negara-negara berkembang. Mereka melihat bagaimana negara-negara emerging economies telah berkontribusi pada pembangunan di negara-negara berkembang lain. Sebagian besar negara-negara tersebut tetap merupakan beneficiaries dari bantuan negara-negara maju dengan jumlah yang masih sangat besar. Beberapa pengkaji menempatkan peran donor baru dalam perspektif perbandingan dengan donor-donor tradisional. Walz dan Ramachandran (2011) melihat pendekatan baru yang diperkenalkan oleh *emerging donors*. Nadine Piefer (2014) juga mengidentifikasi perbedaan-perbedaan tersebut dan melihat potensi Kerjasama Triangular sebagai jembatan penghubung kerjasama Utara Selatan secara lebih mendalam.

Tabel 5.10. Prinsip-prinsip Kerjasama-Utara Selatan dan Selatan-Selatan

No	Kerjasama Utara Selatan (berdasar Deklarasi Paris, 2005)	Kerjasama Selatan-Selatan (Deklarasi Menteri-menteri Luar Negeri G77 dan China, 2009)
1.	<p>Ownership: Negara-negara penerima bantuan menetapkan strategi mereka sendiri untuk pengurangan kemiskinan, mengembangkan institusi-institusi mereka dan mengatasi korupsi</p>	<p>Common endeavor of peoples and countries of the South as an expression of South-South solidarity and strategy for economic independence and self-reliance of the South based on their common objectives and solidarity;</p> <p>Demand driven cooperation (agenda kerjasama dilakukan atas dasar permintaan negara penerima/mitra);</p> <p>Financial contributions should be seen as merely expression of solidarity and cooperation borne out of shared experience and symphaties.</p>
2.	<p>Alignment: Negara-negara donor menyesuaikan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan negara penerima bantuan dan menggunakan sistem lokal</p>	<p>A strong, genuine, broad-based partnership and solidarity;</p> <p>A development agenda based on premises, conditions and objectives that are specific to the historic and political context of developing countries, and to their needs and expectations. It deserves its own separate and independent promotion.</p> <p>Promotes the exchange of best practices among developing countries in the common pursuit of their development objectives.</p>
3.	<p>Managing for Results: Negara-negara berkemabg dan donor mengalihkan fokus pada hasil-hasil pembangunan dan hasil-hasil tersebut harus dapat diukur</p>	<p>Equality, mutual respect and mutual benefit (Kesetaraan, saling menghargai dan saling menguntungkan)</p>
4.	<p>Mutual accountability: Donor dan mitra-mitranya bertanggung-jawab pada hasil pembangunan</p>	<p>The collective self-reliance of developing countries.</p> <p>Respects national sovereignty in the context of shared responsibility.</p>
5.		<p>SSC must not be seen as a replacement of North-South Cooperation</p>
6.		<p>Must not be analyzed and evaluated using the same standards as those used for North-South relations.</p>
7.		<p>Strives for strengthened multilateralism in the promotion of an action-oriented approach to development challenges.</p> <p>The modalities and mechanisms for promoting SSC are based on bilateral, sub-regional, regional and interregional cooperation and integration as well as multilateral cooperation.</p>

Sumber: Diolah penulis berdasar Deklarasi Paris 2005 dan Deklarasi Menteri-Menteri Luar Negeri G77 dan China, pada pertemuan ke-33, September 2009. Tertuang dalam Laporan Final Penelitian Hibah Bersaing Dikti, Nopember 2015.

Perbedaan prinsip-prinsip kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.11. Dengan menempatkan pada perspektif perbandingan terlihat bahwa model Selatan berbeda dengan model konvensional DAC/OECD.

Table 5.11. Karakteristik Kerjasama Selatan-Selatan

No.	Aspek	Karakteristik
1.	Capacity development	Kerjasama teknik SS cenderung fokus pada pembangunan kapasitas sebagai proses yang berbeda dengan produk; kerjasama teknik menjadi alat untuk mutual learning
2.	A broader choice of support leading to horizontal partnerships,	Kerjasama teknik SS menawarkan beragam tipe hubungan dan dapat meningkatkan keberagaman pilihan bagi kerjasama teknikal di tingkat negara dan regional, sekaligus menciptakan bentuk horisonl kemitraan pembangunan
3.	Cost effectiveness,	KSS menekankan “superior value for money”, mempertimbangkan sumber-sumber regional dan nasional.
4.	Demand-driven character,	Karena terbatasnya sumber-sumber dan hubungan horizontal di antara mitra-mitra kerjasama, KSS lebih menekankan prioritas dan kebutuhan-kebutuhan negara-negara penerima.
5.	Adaptability	KSS menawarkan solusi yang lebih relevan dan sesuai, khususnya dalam hal teknologi yang relevan dan pemahaman kultural, karena baik penerima dan penyedia bantuan men-sharingkan tantangan-tantangan pembangunan.
6.	Southern knowledge.	KSS menawarkan keberagaman pengetahuan dan kepakaran <i>beyond industrialized models</i> .

Sumber: Partners in Population and Development. (2014, hal. 4-5); Tertuang dalam Laporan Final Penelitian Hibah Bersaing Dikti, Nopember 2015.

KSS memiliki ciri-ciri yang unik seperti ditunjukkan dalam Tabel 5.10. Karakteristik ini khususnya terkait dengan upaya untuk mewujudkan efektivitas KSS. Karakteristik itu meliputi *capacity development, a broader choice of support leading to horizontal partnerships, cost effectiveness, demand-driven character, adaptability dan Southern knowledge*.³⁶

³⁶ Partners in Population and Development. (2014) *South South Cooperation: A Pathway for Development*. Khususnya Chapter 1. Overview of South-South Cooperation. November 2014. http://partners-popdev.org/docs/PPD_South-South_Book.pdf

Tabel 5.12. Prinsip-prinsip KSS

No.	Prinsip
1	SSC as common endeavor of peoples and countries of the South as an expression of South-South solidarity and strategy for economic independence and self-reliance of the South based on their common objectives and solidarity;
2	SSC and its agenda must be driven by the countries of the South (agenda kerjasama dilakukan atas dasar permintaan negara penerima/ mitra);
3	SSC must not be seen as a replacement of North-South Cooperation. Strengthening South-South Cooperation must not be a measure of coping with the receding interest of the developed world in assisting developing countries.
4	Cooperation between countries of the South must not be analyzed and evaluated using the same standards as those used for North-South relations.
5	Financial contributions should not be seen as official development assistance from these countries to other countries of the South. These are merely expression of solidarity and cooperation borne out of shared experience and sympathies.
6	SSC is a development agenda based on premises, conditions and objectives that are specific to the historic and political context of developing countries, and to their needs and expectations. It deserves its own separate and independent promotion.
7	SSC is based on a strong, genuine, broad-based partnership and solidarity;
8	SSC is based on equality, mutual respect and mutual benefit (Kesetaraan, saling menghargai dan saling menguntungkan)
9	SSC respects national sovereignty in the context of shared responsibility.
10	SSC strives for strengthened multilateralism in the promotion of an action-oriented approach to development challenges.
11	SSC promotes the exchange of best practices among developing countries in the common pursuit of their development objectives.
12	SSC is based on the collective self-reliance of developing countries.
13	SSC seeks to enable developing countries to play a more active role in international policy and decision-making processes, in support of their efforts to achieve sustainable development.
14	The modalities and mechanisms for promoting SSC are based on bilateral, sub-regional, regional and interregional cooperation and integration as well as multilateral cooperation.

Sumber: Partners in Population and Development. (2014, hal.6-7); Tertuang dalam Laporan Final Penelitian Hibah Bersaing Dikti, Nopember 2015.

Negara-negara yang tergabung dalam KSS menegaskan bahwa KSS bukanlah pendekatan yang dimaksudkan untuk menggantikan kerjasama Utara Selatan. Ini tidak untuk menunjukkan berkurangnya kepentingan negara maju dalam membantu negara-negara berkembang. Mereka juga menolak untuk memakai standar evaluasi yang selama ini diadopsi Kerjasama Utara Selatan untuk mengevaluasi KSS. Dalam pertemuan tahunan ke-33 Menteri-menteri Luar Negeri G77 dan China, disepakati sejumlah prinsip KSS, yang dituangkan dalam Tabel 5.12.

Namun, bila model Selatan ditelusur lebih lanjut, terdapat keberagaman dalam pengadopsian Model Selatan. Deskripsi yang telah ditunjukkan pada masing-masing agensi kerjasama pembangunan internasional menemukan perbedaan struktural dan fungsional dari setiap agensi tersebut (Lihat Tabel 5.2 – 5.8). Masing-masing negara memiliki penekanan yang berbeda-beda menyangkut program-program unggulan mereka. Temuan ini sejalan dengan temuan Walz dan Ramachandran (2011), seperti ditunjukkan dalam Tabel 5.13. Tabel tersebut menunjukkan keberagaman modalitas dan sektor-sektor utama dalam kerjasama pembangunan internasional. Masing-masing negara juga memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan negara-negara mitra kerjasama mereka (top recipients).

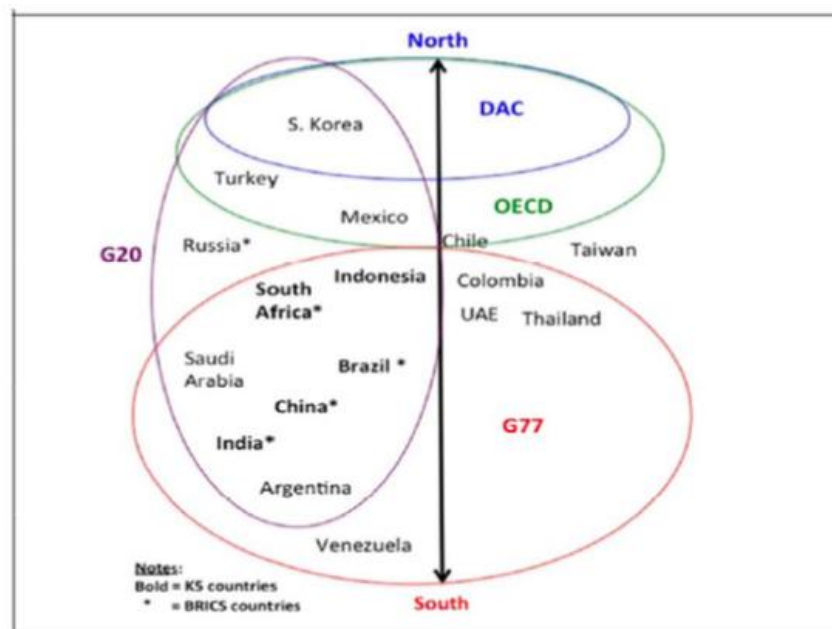
Tabel 5.13. Keberagaman Bantuan Pembangunan di antara Sejumlah *Emerging Economies*

No	Negara	Modalitas	Target Penerima	Sektor utama
1	Argentina	Terutama berorientasi pada proyek dan kerjasama teknikal. Beberapa <i>debt relief</i> .	Sebagian besar negara Amerika Latin (Bolivia, Ekuador, Peru, Kuba, Haiti). Diperluas ke Afrika (Angola, Mozambique dan Zambia).	Agrikultur dan ketahanan pangan, kesehatan ibu dan anak, Hak Asasi Manusia.
2	Brasil	Terutama kerjasama teknik dan proyek-proyek yang didanai bersama. Beberapa <i>debt relief</i> dan jumlah besar untuk bantuan bencana.	Haiti, Cape Verde, Timor Leste. Yang lain berfokus pada Lusophone dan negara-negara Amerika Selatan.	Khususnya sektor-sektor sosial. Terlibat juga dalam agrikultur, biofuels dan etanol dan <i>digital inclusion</i>
3.	China	Bantuan Bilateral; Proyek-proyek, kerjasama teknikal dan <i>debt relief</i> .	Afrika (46%), Asia (33%), Amerika Latin (13%)	Infrastruktur ekonomik (61%), energy dan sumber-sumbernya (9%); agrikultur (4%)
4.	India	Sebagian besar berorientasi pada proyek dan kerjasama teknikal (dengan perkecualian pada dukungan lebih besar pada negara-negara tetangga. Beberapa <i>debt relief</i> .	Bhutan (36%), Afghanistan (25%), Nepal (13%), kira-kira 85% ke Asia; 15% ke Afrika.	Pembangunan pedesaan, pendidikan, kesehatan, kerjasama teknikal. Juga menyediakan pinjaman khususnya untuk infrastruktur
5.	Afrika Selatan	Mayoritas melalui saluran multilateral (khususnya NEPAD, African Renaissance Fund). Beberapa <i>debt relief</i> .	Southern African Development Community (70%) dan negara-negara Afrika lainnya.	Banyak aktivitas melalui peacekeeping, rekonstruksi pasca konflik, kerjasama teknikal. Mulai terlibat pada pembangunan infrakstruktur.

Sumber: Diambil sebagian dari Walz, J dan Ramachandran, V. (2011: hal. 15); Tertuang dalam Laporan Final Penelitian Hibah Bersaing Dikti, Nopember 2015.

Apakah kerjasama Selatan Selatan akan lebih efektif dibandingkan model tradisional? Lindsay Whitfield (2009: 1-3) mengidentifikasi dua isu terkait upaya meningkatkan efektivitas bantuan. Pertama adalah bahwa *aid architecture is in chaos* (arsitektur bantuan dalam situasi kekacauan), di mana ratusan agensi telah terlibat dalam bisnis bantuan dan agenda mereka yang beragam kini bersaing satu sama lain untuk mendapatkan ruang di negara-negara miskin. Negara-negara miskin penerima bantuan secara finansial dan administratif masuk dalam perangkat donor. Situasi ini semakin tidak menentu karena berkembangnya isu-isu global baru seperti terorisme dan munculnya donor non-Barat seperti China dan India. Isu kedua adalah “*Western aid agencies have constrained the policymaking options of aid-receiving governments by demanding that their money is spent on their priorities.*” Mereka menekankan bahwa jika mereka mengikuti permintaan donor untuk mengubah kebijakan ekonomi dan sosial mereka, mereka akan mendapatkan lebih banyak bantuan. Pendekatan ini telah mendapatkan kritik keras. Memaksakan kebijakan, reformasi dan prioritas lebih melahirkan kesulitan di negara-negara penerima bantuan, mencampuri kedaulatan nasional, merusak demokrasi dan menyingkirkan kepedulian dan solusi lokal.

Gambar 5.14. Negara-negara Emerging Economies dalam Perdebatan Efektivitas Bantuan

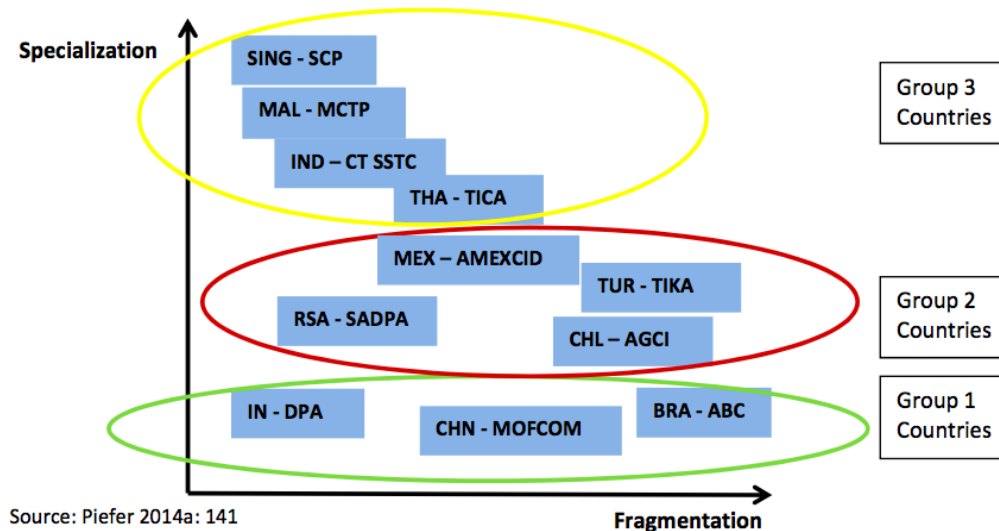


Sumber: Piefer (2014, 9) mengutip Besharati (2013, 30); Tertuang dalam Laporan Final Penelitian Hibah Bersaing Dikti, Nopember 2015.

Efektivitas bantuan menjadi isu perdebatan yang panjang dalam model tradisional. Alternatif model Selatan juga berhadapan dengan isu yang sama: bagaimana memastikan bahwa kemitraan yang setara dapat berfungsi lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan utama kerjasama pembangunan internasional. Berharati (2013: 30 seperti dikutip dalam Piefer, 2014, hal. 9) menggambarkan pengelompokan-pengelompokan yang muncul dalam perdebatan tersebut dengan baik.

Dalam konteks kesenjangan perspektif dalam melihat dunia hubungan Utara-Selatan dan hubungan Selatan-selatan, kerjasama triangular sebagai alternatif penting dalam kerjasama pembangunan internasional. Nadine Piefer (2014) menempatkan kerja sama triangular sebagai jembatan penghubung antara negara-negara donor tradisional dan donor baru dalam membantu negara berkembang dalam pembangunan mereka. Piefer (2014, 27) berargumen bahwa nilai tambah kerjasama triangular ini dapat tercapai jika sinergi kontribusi dari ketiga mitra lebih besar daripada apa yang dapat diperoleh dari kerjasama di antara dua negara. Kekuatan komparatif dari mitra kerjasama sama idealnya dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan yang diharapkan. Ini seharusnya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional di negara ketiga dan berorientasi pada permintaan dukungan yang khusus. Penerima bantuan seharusnya menjadi inti dari kerjasama triangular.

Gambar 5.15. Perbandingan Pembentukan Institusional Agen-agen Penyalur Bantuan Donor Baru dari Selatan dalam perspektif Spesialisasi dan Fragmentasi



Sumber: Piefer, 2014, hal. 17; Tertuang dalam Laporan Final Penelitian Hibah Bersaing Dikti, Nopember 2015.

Argumentasi lain tentang apakah Kerjasama Selatan-Selatan dapat menjadi model paradigmatik melihat pada seberapa jauh donor-donor baru dari Selatan mampu memperkenalkan suatu pendekatan koheren. Jawabannya menunjukkan keberagaman di antara negara-negara tersebut. Piefer melihatnya secara khusus pada negara-negara emerging economies yang telah memiliki agen khusus penyalur bantuan pembangunan internasional. Seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah, realitasnya menunjukkan keberagaman pendekatan di antara agen-agen penyalur bantuan tersebut.

Kelompok pertama adalah negara-negara seperti China, India dan Brazil yang cenderung untuk lebih menekankan bahwa pendekatan mereka sepenuhnya berbeda dengan donor tradisional dan bertujuan untuk mengembangkan model-model baru kerjasama. Motivasi mereka beragam dari kepentingan ekonomi hingga solidaritas di antara negara-negara berkembang (Piefer, 2014: 17)

Kelompok kedua meliputi negara-negara seperti Meksiko, Turki, dan Afrika Selatan yang ingin menjembatani antara kawasan dan kepentingan. Baik Turki maupun Afrika Selatan mempersepsikan diri sebagai 'big brother' dan mengikuti retorika solidaritas di antara persaudaraan (brothers and sisters) dalam memecahkan tantangan-tantangan pembangunan.

Kelompok ketiga mencakup negara-negara Asia Tenggara yang menekankan pentingnya input spesifik bagi pembangunan internasional. Negara-negara ini mengadopsi pendekatan yang lebih sepi dengan memfokuskan semata-mata pada training dan proyek-proyek bantuan teknik bilateral dan trilateral. Tujuan mereka adalah membangun *regional knowledge hubs*, seperti yang dilakukan Indonesia dan Thailand.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa model Kerjasama Selatan-selatan adalah pendekatan yang masih mencari bentuk. Secara retorika memang terdapat perbedaan antara model baru ini dengan model tradisional yang telah dikembangkan oleh donor-donor tradisional. Dalam praktik memang terdapat penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh donor-donor baru dari negara-negara Selatan. Sebagian menunjukkan ada kesamaan dengan pendekatan yang diadopsi donor tradisional. Sekalipun dalam beberapa aspek, negara-negara donor Selatan mengadopsi pendekatan yang sama, tetapi keberagaman praktik kerjasama pembangunan internasional masih mencerminkan keberagaman.

BAB VI. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis struktur dan fungsi agensi-agensi kerjasama pembangunan internasional yang dikembangkan oleh tujuh *emerging economies* anggota G20.

Dari paparan dalam bagian pembahasan dan analisis, penelitian ini menemukan:

- 1) Terkait dengan struktur, terdapat perbedaan structural di antara agensi-agensi yang dikembangkan ketujuh negara *emerging economies* anggota G20. Terdapat sejumlah negara yang telah mengembangkan agensi sebagai suatu *legal entitas* yang bersifat independen, yaitu Korea dan Arab Saudi. Dalam banyak hal, Turki juga mengembangkan independensi agensinya. Tiga negara menempatkan agensi mereka di bawah struktur Kementerian Luar negeri, yaitu Afrika Selatan, India dan Brasil. China mengembangkan agensinya di bawah Kementerian Komersial.
- 2) Perbedaan struktur tersebut mencerminkan fungsi kerjasama pembangunan internasional yang telah dirumuskan oleh masing-masing negara. Ini sekaligus juga merefleksikan seberapa besar negara-negara tersebut berkomitmen untuk membantu negara-negara berkembang lainnya dan seberapa jauh mereka melihat tingkat independensi agensi dapat berfungsi efektif dalam menjalankan tugas untuk memenuhi tujuan bantuan kerjasama pembangunan internasional.
- 3) Terdapat perbedaan model-model penyaluran bantuan pembangunan internasional yang telah diadopsi oleh negara-negara *emerging economies* anggota G20, yaitu DAC/OECD model, Arab Model, dan Southern Model. Struktur dan fungsi serta mekanisme yang dikembangkan negara-negara yang mengadopsi model OECD lebih terlembaga jauh lebih baik daripada struktur dan fungsi yang dibangun oleh negara-negara yang mengadopsi Southern Model. Negara-negara dengan model DAC/OECD juga telah mengembangkan pendokumentasian yang lebih baik dari negara-negara pengadopsi Model Selatan. Dalam hal ini, Arab Saudi yang mengadopsi Arab Model memiliki struktur kelembagaan yang lebih baik dibanding struktur yang dimiliki oleh negara-negara pengadopsi model Selatan.
- 4) Di antara mereka yang mengadopsi Southern Model, ditemukan beragam variasi pendekatan, penekanan program dan proyek dan implementasinya. Ini menunjukkan bahwa model Selatan-Selatan memang masih terus mencari bentuknya untuk menjadi suatu paradigma baru jika ingin menjadi komplemen bagi model DAC yang umumnya diadopsi oleh negara-negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, I, Kashim, I dan Hermawan YP. (2013) *Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Besharati, N.A. *South African Development Partnership Agency (SADPA): Strategic Aid or Development Packages for Africa?* SAIIA, Research Report 12, Economic Diplomacy Programme. August 2013.
- Birdsall, Nancy dan Kharas, Homi (2010). *Quality of Official Development Assistance Assesment*. Washington: Center for Global Development.
- Casoo, S. (2012). The South African Developmetn Partnership Agency (SADPA). Power point presentation disampaikan oleh Director Dirco, pada ODI Cape Conference di London, 14-15 Nopember 2012.
- Center for Policy Dialogue (2014). *Deconstructing South-South Cooperation. A Southern Perspective on Experience and Challenges. Southern Voice on Post MDGs and CPD*, Dhaka. April 2014.
- Chidaushe, Moreblessings (2010) *South-South Cooperation or Southern hegemony? The Role of South Africa as a 'superpower' and donor in Africa*. <http://www.realityofaid.org/.../ROA-SSDC-Special-Report>.
- Collier, P. dan D. Dollar (2001). "Can the World Cut Poverty in Half? How Policy Reform and Effective Aid Can Meet the International Development Goals." *World Development* Vol. 29, No. 11, hal. 1787-02.
- Crawford, Gordon dan Hermawan, YP. "Whose Agenda? "Partnership" and Internasional Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 24 No.2. hal. 203-229.
- Dervis, Kemal. (2009) *The Developing Countries and the G-20*, (Negara Berkembang dan G-20) dalam *Journal of Turkish Weekly (JTW)*, 20 Maret 2009.
- Dutt, Amitava Krishna. (2013). *South-South Economic Cooperation: Motives, Problems and Possibilities*. Paper prepared for presentation at an URPE session on South-South economic integration and development at the ASSA meetings in Philadelphia, January 4, 2014.
- Easterly, William. (ed.) (2008). *Reinventing Foreign Aid*. Cambridge, Massachusetts and London: MIT.
- Easterly, W dan T Pfitze. (2008). "Where does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid." Working Paper 21. Washington, DC: Brooking Global Economy and Development.
- Fuhrer, Helmut. *A History of the Development Assistance Committee and the Development Cooperation Directorate in Dates, Names and Figures*. OECD, Paris, 1996.

- Girouard, Etienne (2008). *China in Africa. Neo-colonialism or a New Avenue for South-South Cooperation? A Review of Perspectives*. CCIC Canada's Coalition to End Global Poverty, April 2008.
- Groves, Leslie dan Hinton, Rachel. (eds.) (2004). *Inclusive Aid: Changing Power and Relationships in International Development*. London dan Sterling, VA: Earthscan.
- Hatch, David. (2012), *Indonesia, emerging aid donor*, dapat diunduh di: <http://www.lowyinterpreter.org/post/2012/07/25/Indonesia-emerging-aid-donor.aspx> (akses tanggal 9 April 2013)
- Hermawan, Y.P. et.al. (2011). *The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role and Objectives of Indonesia's Membership*. Jakarta: FES.
- Hermawan, Y.P. dan Dewi, E.S. (2014) *Analisis Pengembangan Model South-South and Triangular Cooperation dalam Penyediaan Bantuan Pembangunan Luar Negeri oleh Indonesia sebagai Emerging Economy dalam Forum G-20*. (Laporan Kemajuan tahap I Penelitian Hibang Bersaing), Universitas Katolik Parahyangan, Juni 2014.
- IDS (2014. "Understanding South Africa's Role in Achieving Regional and Global Development Progress," *Policy Briefing*, Issue 64, Mei 2014.
- IORI, Moskow dan G20 Research Group, Toronto, (2012). *Mapping G20 Decisions Implementation, How G20 is delivering on the decisions made*, Desember 2012.
- Kashim, Syurkani Ishak, et.al. (2012). *G20, Ekonomi Global dan Peran Indonesia*. Jakarta: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.
- Kaufmann D. et.al. (1999). "Governance Matters", Policy Research Working Paper 2196. Washington DC: Bank Dunia.
- Killick, Tony. (1998). *Aid and the Political Economy of Policy Change*. London: Routledge.
- Knack, S. dan A Rahman (2004). "Donor Fragmentation and Bureaucratic Quality In Aid Recipients", Policy Research Working Paper 3186. Washington DC: Bank Dunia.
- Lancaster, Carol. (2008) *George Bush's Foreign Aid, Transformation or Chaos?* Washington, D.C.: Center for Global Development.
- Lancaster, Carol. (2007). *Foreign Aid, Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- Lucey, A dan O'Riordan, A. (2014). *South Africa and Aid Effectiveness. Lessons for SADPA as a Development Partner*. ISS Paper 252, Januari 2014.
- Mc. Gillivray, M. (1989). "The Allocation of Aid Among Developing Countries: A Multi-Donor Analysis Using a Per Capita Aid Index," *World Development*, Vol 17, no. 4, hal. 561-8

- McGillivray, M., dan H White (1994). Development Criteria for the Allocation of Aid and Assesment of Donor Performance.” Center for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham, UK.
- Mosley, P. (1985). “The Political Economy of Foreign Aid: A Model of the market for a Public Good,” *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 33, No. 2, hal. 373-93.
- Partners in Population and Development. (2014) *South South Cooperation: A Pathway for Development*. Khususnya Chapter 1. Overview of South-South Cooperation. November 2014. http://partners-popdev.org/docs/PPD_South-South_Book.pdf
- Piefer, Nadine. (2014) *Triangular Cooperation –Bridging South-South and North-South Cooperation*. Paper prepared for the “Workshop on South-South Development Cooperation”, University of Heidelberg, September 26-27, 2014.
- Quadira, Fahimul (2013). “Rising Donors and the New Narrative of South-South Cooperation: what prospects for changing the landscape of development assistance programme?” *Third World Quarterly*, Volume. 34, Issue 2, 2013.
- Robledo, Carmen. (2015). “New Donors, Same Old Practices? South-South Cooperation of Latin American Emerging Donors,” *Bandung: Journal of the global South*, DOI 10.1186/s407728-014-0008-0.
- Salim, Randy dan Al-Arief, Mohamad, *World Bank Report: Indonesia, Emerging Markets Redefine Global Economy*. Dapat diunduh di: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:22938727~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:226309,00.html> (diakses tanggal 9 April 2013).
- Sato, Jin. et.al. (2010). *How do “Emerging” Donors Differ from “Traditional Donors?— An Institutional Analysis of Foreign Aid in Cambodia*. JICA Research Institute, No. 2, March 2010.
- Ssenyange, Edward (2011). *South-South Development Cooperation: A Challenge to Traditional Aid Relations?* Uganda Debt Network. www.realityofaid.org/wp-content/.../ROA-SSDC-Special-Report5.pdf.
- Stuenkel, Oliver. (2013). *Institutionalizing South-South Cooperation: Towards a New Paradigm? Background Research Paper*. Submitted to the High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda. May 2013.
- Task Team on South-South Cooperation. (2011) *Towards Effective South-South and Triangular Cooperation*. Good Practice paper. October 2011.
- The Task Team on South-South Cooperation. *Boosting South-South Cooperation in the Context of Aid Effectiveness. Telling the Story of Partners Involved in more than 110 Cases of South-South and Triangular Cooperation*. March 2010.
- Trinidad, Dennis D. (2014) *South-South Cooperation in Southeast Asia and the Role of Japan*. Institute of Developing Economies. Japan External Trade Organization.

- Ulrichsen, Kristian Coates. (2012) "South-South Cooperation and the Changing Role of the Gulf States." *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*. Vol 1, No. 1, Jan-June 2012, pp. 103-123.
- UNCTAD (2011). *South-South Integration is Key to Rebalancing the Global Economy*. No. 22, February 2011.
- Vahnheukelom, J., et.al. (2012). "Reporting on Development: ODA and Financing for Development", Final Report, European Centre for Development Policy Management. April 2012.
- Walz, Julie dan Ramachandran, Vijaya. (2011). *Brave New World. A Literature Review of Emerging Donors and the Changing Nature of Foreign Assistance*. Center for Global Development. Working Paper 273 November 2011.
- Whitfield, Lindsay. *The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors*. Oxford: Oxford University Press.
- Zhou, Hong. (2015). *Foreign Aid in China*. Springer Heidelberg: Springer.